

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 - 2025



Oleh :



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KABUPATEN BENGKALIS**

TAHUN 2005

DAFTAR ISI

Bab	Isi	Hal.
	DAFTAR ISI	i
	DAFTAR TABEL	ii
1	PENDAHULUAN	1 - 1
	1.1. Latar Belakang	1 - 1
	1.2. Pengertian	1 - 2
	1.3. Maksud dan Tujuan	1 - 3
	1.4. Landasan Hukum	1 - 3
	1.5. Hubungan Dengan Dokumen Perencanaan Lain	1 - 4
	1.6. Sistematika Penyusunan	1 - 5
2	KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH	2 - 1
	2.1. Kondisi dan Analisis	2 - 1
	2.1.1. Geomorfologis dan Lingkungan Hidup	2 - 1
	2.1.2. Demografi	2 - 2
	2.1.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam	2 - 4
	2.1.4. Sosial Budaya Daerah.....	2 -12
	2.1.5. Sarana dan Prasarana Daerah.....	2 -20
	2.1.6. Politik dan Pemerintahan	2 -22
	2.1.7. Kewilayahan	2 -25
	2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah	2 -26
	2.2.1. Geomorfologis dan Lingkungan Hidup	2 -26
	2.2.2. Demografi	2 -28
	2.2.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam	2 -30
	2.2.4. Sosial Budaya	2 -46
	2.2.5. Sarana dan Prasarana	2 -51
	2.2.6. Politik dan Pemerintahan	2 -55
	2.2.7. Kewilayahan	2 -58
3	VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH	3 - 1
	3.1. Visi	3 - 1
	3.2. Misi	3 - 3
	3.3. Arah Pembangunan	3 - 5
4	KAIDAH PELAKSANAAN	4 - 1
5	PENUTUP	5 - 1

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal.
2.1	Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Bengkalis Tahun 1999-2004 (Orang) .	2-3
2.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis Tahun 2000 – 2005 (Milyar Rupiah)	2-4
2.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Bengkalis Tahun 2000 – 2005 (Milyar Rupiah)	2-5
2.4	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkalis Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2000 – 2005 (Persen)	2-6
2.5	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkalis Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2000 – 2005 (Persen)	2-7
2.6	Gambaran Keberhasilan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2000 – 2004	2-14
2.7	Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Orang) .	2-28
2.8	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 (Milyar Rupiah)	2-31
2.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 (Milyar Rupiah)	2-31
2.10	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkalis Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005 – 2025 (Persen)	2-32
2.11	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkalis Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005 – 2025 (Persen)	2-32

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sejarah mencatat, meskipun dalam kurun waktu 1969 - 1997, bangsa Indonesia telah berhasil menyusun rencana pembangunan nasional secara sistematis melalui tahapan lima tahunan yang meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial. Akan tetapi realisasinya menunjukkan hasil yang timpang dari sisi keadilan yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Proses pembangunan pada waktu tersebut sangat berorientasi pada output dan hasil akhir. Sementara proses dan terutama kualitas institusi yang mendukung dan melaksanakan tidak dikembangkan dan bahkan ditekan secara politis sehingga menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara profesional. Hal yang disebutkan dengan ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan politik, hukum dan sosial inilah yang menyebabkan ketimpangan hasil pembangunan dari sisi keadilan.

Sejak tahun 1998, pembangunan telah difokuskan pada upaya mengatasi dan pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat krisis multidimensional yang terjadi sejak tahun 1997. Namun upaya tersebut belum dapat memenuhi harapan semua pihak agar dapat kembali pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, makmur dan berkeadilan. Dalam kondisi seperti ini, sudah saatnya untuk memikirkan kembali perencanaan pembangunan yang berdimensi waktu jangka panjang (20 tahunan). Pemikiran ini diperkuat dengan TAP MPR Nomor VII Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan yang menugaskan kepada semua penyelenggara negara untuk menggunakan visi tersebut sebagai pedoman dalam merumuskan arah kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang tersebut oleh daerah adalah merupakan upaya perwujudan keadaan yang dicita-citakan dan diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan sesuatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam tatanan sosial dan politik, mengiringi perubahan dalam tatanan birokrasi ke arah sistem manajemen pemerintah daerah yang lebih demokratis, transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk dalam fungsi pemerintah daerah sebagai perencana pembangunan, perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah. Kewenangan ini harus disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan termasuk di dalamnya adalah kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan negara sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, sinergis dengan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah secara partisipasi melalui rangkaian forum musyawarah. Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Berdasarkan pertimbangan ini maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam RPJM.
- b. Menyediakan satu pedoman berwawasan jauh untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mendasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksinya ke depan.
- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan dua puluh tahunan ke depan.

1.4. Landasan Hukum

Landasan yang berlaku dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis adalah Pancasila sebagai landasan Idiel dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

1.5. Hubungan Dengan Dokumen Perencanaan lain

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 ini adalah merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis Tahun 2002 – 2012 sebagai salah satu dokumen perencanaan yang sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah.

Disamping dokumen-dokumen tersebut, juga RPJP ini tidak bisa dipisahkan dengan dokumen perencanaan yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama namun dalam perspektif kebijakan yang lebih luas lagi, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau (RPJP Provinsi Riau), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis yang disusun setiap lima tahun sebagai penjabaran dari pada RPJP ini.

1.6. Sistematika Penyusunan

Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Pengertian
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Hubungan Dengan Dokumen Perencanaan Lain
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II : KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1. Kondisi dan Analisis
 - 2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam
 - 2.1.4. Sosial Budaya dan Politik
 - 2.1.5. Prasarana dan Sarana
 - 2.1.6. Kewilayahan
- 2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah
 - 2.21. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
 - 2.22. Demografi
 - 2.23. Ekonomi dan Sumberdaya Alam
 - 2.24. Sosial Budaya dan Politik
 - 2.25. Prasarana dan Sarana
 - 2.26. Kewilayahan

BAB III : VISI, MISI, ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Arah Pembangunan Daerah

BAB IV : KAIDAH PELAKSANAAN

BAB V : PENUTUP

Bab 2

Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah

2.1. Kondisi dan Analisis

2.1.1. Geomorfologis dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Riau. Kondisi geografis wilayah terletak di bagian Pesisir Timur Pulau Sumatera, antara 2°30' - 0°30' LU dan 102°52' - 102°10' BT. Secara geografis, lokasi Kabupaten Bengkalis sangat strategis, karena terletak pada jalur pelayanan internasional Selat Malaka, dengan batas wilayah administrasi daerah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis setelah pemekaran adalah 11.481,77 Km², terbagi dalam 13 kecamatan yaitu Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu, Siak Kecil, Rumat, Rumat Utara, Bengkalis, Bantan, Merbau, Rangsang, Rangsang Barat, Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Barat. Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan dataran rendah yang ditumbuhi hutan tropis, pantainya landai dan merupakan endapan lumpur sebagai hasil erosi sungai terutama di Pulau Rangsang, Pulau Berkey, Pulau Babi dan Pulau Halang. Daerah perbukitan yang tingginya lebih dari 25 meter di atas permukaan laut hanya terletak di wilayah Kecamatan Mandau. Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai yang memiliki arti sangat penting sebagai sarana transportasi utama dalam perekonomian masyarakat, di antaranya yang besar adalah Sungai Siak dengan panjang 300 Km, Sungai Siak Kecil 90 Km dan Sungai Mandau 87 Km.

Pada umumnya Kabupaten Bengkalis beriklim tropis sepanjang tahun dengan temperatur antara 26^oC – 32^oC. Curah hujan di daerah ini rata-rata 174,24 mm dengan rata-rata banyaknya hari hujan selama 6 hari sampai 14 hari pada tahun 2004.

Berdasarkan *land clasification* dari hasil citra satelit 2002, pemanfaatan ruang dominan di Kabupaten Bengkalis terdiri dari kawasan hutan (476.997,40 Ha), perkebunan karet, sawit dan kelapa (285,821.14 Ha), pertanian lahan basah (sawah/sagu) dan lahan kering (tegalan/sawah tadah hujan (166.439,21 Ha), pemukiman perkotaan (2.179,90 Ha), mangrove (56.313,09 Ha) serta tanah terbuka (27.893,26 Ha).

Ekosistem wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Bengkalis adalah lahan rawa gambut dan kawasan mangrove yang tersebar di wilayah pesisir. Pada umumnya lahan rawa gambut didominasi oleh hutan rawa dan sagu. Sedangkan kawasan mangrove didominasi oleh hutan bakau, api-api dan nipah. Pada umumnya kawasan hutan mangrove (bakau) di Kabupaten Bengkalis sudah banyak yang mengalami kerusakan, khususnya yang berada disekitar kawasan pemukiman di bagian utara Pulau Bengkalis, Rupert, Pesisir Bukit Batu -Sei. Pakning dan Pulau Padang.

2.1.2. Demografi

Pertumbuhan penduduk dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 rata-rata hanya 5,61 persen yaitu dari 501.657 jiwa menjadi 659.061 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang relatif besar diikuti oleh pertumbuhan tenaga kerja yang besar yaitu dari 323.308 orang di tahun 1999 meningkat dengan tajam pada tahun 2004, sehingga berjumlah 438.864 orang atau meningkat rata-rata 6,30 persen setahun. Tingginya pertumbuhan tenaga kerja ini menunjukkan bahwa tingkat migrasi di Kabupaten Bengkalis sangat tinggi. Mengikuti tingkat pertumbuhan tenaga kerja yang sangat tinggi, maka pertumbuhan angkatan kerja juga menjadi tinggi yaitu di tahun 1999 baru berjumlah 229.399 orang dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 312.953 orang atau meningkat rata-rata 6,41 persen pertahun. Sedangkan penambahan kesempatan kerja juga cukup tinggi di atas pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja, pada tahun 1999

berjumlah 199.592 orang dan tahun 2004 meningkat menjadi 289.771 orang atau naik rata-rata 7,74 persen. Dengan pertumbuhan kesempatan kerja 7,74 persen dan pertumbuhan angkatan kerja rata-rata 6,41 persen maka tingkat pengangguran terbuka juga akan turun, yaitu tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 turun rata-rata 4,90 persen.

Sektor yang membuka kesempatan kerja paling banyak adalah sektor pertanian yaitu 116.571 orang tahun 1999 dan pada tahun 2004 menjadi 126.057 orang atau meningkat rata-rata 1,58 persen. Pada tahun 1999 kesempatan kerja di sektor pertanian 58,40 persen dan tahun 2004 menjadi 43,50 persen. Sektor kedua yang membuka kesempatan kerja yang juga tinggi adalah perdagangan, pada tahun 1999 sebanyak 30.972 orang atau 15,52 persen dan di tahun 2004 menjadi 32.961 orang atau 11,37 persen dan sektor yang ketiga adalah jasa, pada tahun 1999 berjumlah 18.068 orang atau 9,05 persen dan tahun 2004 sebesar 29.887 orang atau 10,31 persen. Dengan demikian kesempatan kerja di tahun 1999 sebesar 82,97 persen diisi oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa. Pada tahun 2004, kesempatan kerja pada sektor pertanian dan perdagangan tetap pada posisi pertama dan kedua, sedangkan posisi ketiga mengalami pergeseran dari sektor jasa ke sektor bangunan. Dengan demikian kesempatan kerja dari ketiga sektor tersebut pada tahun 2004 sebesar 66,08 persen.

Tabel 2.1 : Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Bengkalis Tahun 1999 – 2004 (Orang)

Sektor	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Pert. (%)
1. Pertanian	116.571	122.965	93.298	97.721	114.779	126.057	1,58
2. Pertambangan	14.195	14.974	23.905	30.263	26.972	24.573	11,60
3. Industri	6.452	6.806	12.002	19.081	11.844	16.333	20,41
4. Listrik	-	-	-	-	-	-	-
5. Bangunan	3.441	3.630	14.264	22.639	30.148	32.483	56,67
6. Perdagangan	30.972	32.671	28.527	24.256	29.906	32.961	1,25
7. Pengangkutan	8.603	9.075	14.690	16.910	21.965	23.362	22,12
8. Keuangan	1.290	1.361	1.800	647	3.822	4.115	26,11
9. Jasa	18.068	19.058	29.162	19.495	29.745	29.887	10,59
Kesempatan Kerja	199.592	210.540	217.648	231.012	269.181	289.771	7,74
Angkatan Kerja	229.399	237.897	245.929	261.030	300.761	312.953	6,41
Tenaga Kerja	323.308	335.285	346.605	367.888	421.767	438.864	6,30
Pengangguran	29.807	27.357	28.281	30.018	31.590	23.182	- 4,90
Penduduk	501.657	520.241	534.184	549.715	633.386	659.061	5,61

Sumber : BPS Provinsi Riau

2.1.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam

2.1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas

PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas Kabupaten Bengkalis pada tahun 2000 berjumlah Rp 2.337,87 milyar yang terdiri dari sektor pertanian Rp 785,35 milyar atau 33,59 persen, sektor perdagangan Rp 691,47 milyar atau 29,58 persen dan sektor industri Rp 355,59 milyar atau 15,21 persen sehingga sumbangan ketiga sektor tersebut telah mencapai 78,38 persen dan sumbangan sektor lainnya sebesar Rp 505,46 milyar atau 21,62 persen. Jadi pada tahun 2000 terdapat sektor yang cukup dominan yaitu sektor pertanian, perdagangan dan industri.

Pada tahun 2005 jumlah PDRB sebesar Rp 8.751,36 milyar yang terdiri dari sektor pertanian Rp 2.775,04 milyar atau 31,71 persen, sektor perdagangan Rp 1.553,67 milyar atau 17,75 persen dan sektor industri Rp 3.174,16 milyar atau 36,27 persen dan sumbangan sektor lainnya sebesar Rp 1.248,49 milyar atau 14,27 persen. Dibandingkan dengan tahun 2000 dengan tahun 2005, peranan ketiga sektor kunci yaitu sektor pertanian, perdagangan dan industri meningkat dari 78,38 persen menjadi 85,73 persen.

Tabel 2.2 : Produk Domestik regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis Tahun 2000 - 2005 Tanpa Migas (Milyar Rupiah)

Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	785,35	1.011,79	1.401,69	1.886,61	2.343,89	2.775,04
- Tanaman Pangan	173,09	191,68	205,45	214,00	233,85	257,24
- Perkebunan	69,38	88,56	282,55	420,55	528,00	633,60
- Peternakan	57,17	62,47	69,76	77,90	89,65	100,32
- Kehutanan	386,57	505,22	655,75	936,49	213,13	1.455,76
- Perikanan	99,14	163,86	188,18	237,67	279,26	328,12
2. Pertambangan	4,61	5,84	7,09	8,56	10,54	12,96
3. Industri	355,59	943,75	1.315,65	935,12	2.539,33	3.174,16
4. Listrik	17,35	20,94	25,62	34,98	41,36	51,39
5. Bangunan	99,93	123,72	155,30	183,15	222,67	267,20
6. Perdagangan	691,47	793,36	871,79	1.036,04	1.322,39	1.553,67
- Perdagangan	680,57	780,21	854,78	1.012,68	1.277,49	1.495,30
- Hotel	6,98	8,25	10,14	14,37	30,50	39,65
- Restoran	3,92	4,90	6,87	8,99	14,40	18,72
7. Pengangkutan	77,05	90,92	108,26	125,39	163,82	197,81
8. Keuangan	43,32	61,98	83,48	103,50	131,43	164,29
9. Jasa	263,20	305,75	354,54	398,42	477,96	554,84
PDRB	2.337,87	3.358,05	4.313,42	5.711,77	7.253,39	8.751,36

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk tahun 2000 berjumlah Rp 2.337,87 milyar dengan sumbangan terbesar masih pada sektor pertanian sebesar Rp 785,35 milyar. Keadaan ini hampir tidak berubah sampai pada tahun 2005 dengan jumlah PDRB sebesar Rp 3.367,49 milyar.

Tabel 2.3 : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2000 - 2005 (Milyar Rupiah)

Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	785,35	839,19	885,90	930,98	983,40	1.045,16
- Tanaman Pangan	173,09	178,03	182,00	186,27	195,41	205,18
- Perkebunan	69,38	75,20	77,98	83,15	89,06	94,79
- Peternakan	57,17	58,81	62,12	85,23	69,91	73,76
- Kehutanan	386,57	420,59	450,13	475,64	498,15	530,75
- Perikanan	99,14	106,56	113,67	120,69	130,87	140,68
2. Pertambangan	4,61	5,25	5,68	6,29	7,31	8,19
3. Industri	355,59	389,21	423,59	461,34	498,71	541,10
4. Listrik	17,35	17,73	18,83	19,72	21,13	22,71
5. Bangunan	99,93	107,67	113,47	121,93	133,32	143,28
6. Perdagangan	691,47	730,28	775,17	859,06	933,45	1.006,11
- Perdagangan	680,57	718,53	762,53	845,40	918,24	989,64
- Hotel	6,98	7,39	7,95	8,56	9,41	10,07
- Restoran	3,92	4,36	4,69	5,10	5,80	6,40
7. Pengangkutan	77,05	83,14	91,81	99,79	112,02	123,22
8. Keuangan	43,32	48,53	54,25	59,88	68,11	76,27
9. Jasa	263,20	283,23	303,44	330,46	368,94	401,45
PDRB	2.337,87	2.504,23	2.672,14	2.889,45	3.126,39	3.367,49

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis

Persentase distribusi PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 hampir tidak berubah. Sektor pertanian peranannya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 turun dari 33,70 persen menjadi 31,46 persen dengan pertumbuhan rata-rata 5,88 persen. Sub sektor yang menonjol adalah kehutanan yang peranannya pada tahun 2000 sebesar 16,64 persen turun menjadi 15,93 persen dan pertumbuhan rata-rata 6,54 persen. Sub sektor tanaman pangan menurun dari 7,40 persen menjadi 6,25 persen dengan pertumbuhan 3,46 persen.

Peranan sektor industri naik dari 15,21 persen ditahun 2000 menjadi 15,95 persen tahun 2005 dengan pertumbuhan sebesar 8,76 persen. Sektor perdagangan peranannya meningkat dari 29,58 persen menjadi 29,85 persen dengan pertumbuhan 7,79 persen. Pada sektor perdagangan peranan yang besar diperlihatkan oleh subsektor perdagangan umum yang peranannya naik dari 29,11 persen menjadi 29,37 persen dengan pertumbuhannya sebesar 7,78 persen. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 rata-rata 7,57 persen, antara lain tahun 2000 4,04 persen, tahun 2003 sebesar 8,13 persen dan akhirnya tahun 2005 sebesar 7,71 persen.

Tabel 2.4 : Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkalis Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2000 - 2005 (Persen)

Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-Rata
1. Pertanian	33,70	33,52	33,15	32,23	31,46	31,46	31,03
- Tanaman Pangan	7,40	7,11	6,81	6,45	6,25	6,25	6,09
- Perkebunan	2,97	3,00	2,92	2,88	2,85	2,85	2,81
- Peternakan	2,45	2,35	2,32	2,26	2,24	2,24	2,19
- Kehutanan	16,64	16,80	16,85	16,46	15,93	15,93	15,76
- Perikanan	4,24	4,26	4,25	4,18	4,19	4,19	4,18
2. Pertambangan	0,20	0,21	0,21	0,32	0,23	0,23	0,24
3. Industri	15,21	15,54	15,85	15,97	15,95	15,95	16,07
4. Listrik	0,74	0,71	0,70	0,68	0,68	0,68	0,67
5. Bangunan	4,27	4,30	4,25	4,22	4,26	4,26	4,25
6. Perdagangan	29,58	29,16	29,02	29,74	29,85	29,85	29,88
- Perdagangan	29,11	28,69	28,54	29,26	29,37	29,37	29,39
- Hotel	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- Restoran	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19
7. Pengangkutan	3,30	3,32	3,44	3,45	3,58	3,58	3,66
8. Keuangan	1,85	1,94	2,03	2,07	2,18	2,18	2,26
9. Jasa	11,15	11,30	11,35	11,42	11,81	11,81	11,94
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis

Tabel 2.5 : Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkalis Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2000 - 2005 (Persen)

Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-Rata
1. Pertanian	5,70	6,85	5,57	5,02	5,63	6,28	5,88
- Tanaman Pangan	1,88	2,85	2,23	2,35	4,91	5,00	3,46
- Perkebunan	12,53	8,39	3,70	6,63	7,11	6,43	6,44
- Peternakan	4,58	2,87	5,63	5,01	7,14	5,51	5,23
- Kehutanan	7,04	8,80	7,02	5,67	4,73	6,54	6,54
- Perikanan	5,58	7,48	6,67	6,18	8,44	7,50	7,25
2. Pertambangan	0,67	13,88	8,19	10,74	16,22	12,04	12,18
3. Industri	9,96	9,45	8,83	8,91	8,10	8,50	8,76
4. Listrik	2,25	2,19	6,20	4,73	7,15	7,48	5,53
5. Bangunan	-3,80	7,75	5,39	7,46	9,34	7,47	7,47
6. Perdagangan	1,49	5,61	6,15	10,82	8,66	7,78	7,79
- Perdagangan	5,43	5,58	6,12	10,87	8,62	7,78	7,78
- Hotel	1,88	5,87	7,58	7,67	9,93	7,01	7,61
- Restoran	3,52	11,22	7,57	8,74	13,73	10,34	10,30
7. Pengangkutan	5,80	7,90	10,43	8,69	12,26	10,00	9,85
8. Keuangan	-5,84	12,03	11,79	10,38	13,74	11,98	11,98
9. Jasa	2,17	7,61	7,14	8,90	11,64	8,81	8,81
PDRB	4,04	7,12	6,71	8,13	8,20	7,71	7,57

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis

2.1.3.2. Perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memiliki peranan dan arti strategis dalam program pengembangan daerah. Gejolak ekonomi semasa krisis sampai sekarang membuktikan bahwa koperasi dan UKM mampu tumbuh dan berkembang dengan baik di tengah sulitnya perekonomian bangkit mengejar angka pertumbuhan. Bila mana keberadaan koperasi dan UKM dapat tumbuh dengan baik akan dapat memperkuat ketahanan ekonomi. Pada tahun 2004 Koperasi di Bengkalis berjumlah 630 unit, jumlah anggota 39.098 orang dan modal telah mencapai Rp 9.617.959.000. Sedangkan untuk usaha kecil menengah juga sangat berperan penting dalam menopang perekonomian. Jumlah UKM sampai dengan tahun 2004 mencapai 3.589 unit,

dengan bidang usaha perdagangan 1.856 unit, bidang industri 707 unit, industri non pertanian 541 unit, dan aneka usaha mendapai 98 unit. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi dan UKM dan untuk memacu laju produksi lokal dan lapangan kerja baru, maka dilakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Koperasi dan UKM baik kelembagaan maupun terhadap usaha. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan antara lain melalui kegiatan; pelatihan teknis dan magang, bantuan permodalan, bimbingan teknis, temu usaha pemasaran, kerjasama dan kemitraan, peningkatan akses pasar bagi produk Koperasi dan UKM.

2.1.3.3. Sumberdaya Alam

Kabupaten Bengkalis mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut menyebar hampir merata di seluruh wilayah kecamatan, antara lain pertanian (tanaman pangan dan peternakan), perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata. Gambaran umum tentang potensi dan peluang investasi berdasarkan RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2002 - 2012 adalah sebagai berikut :

a. Pertanian

Untuk tanaman pangan, terdapat beberapa komoditi unggulan yang memiliki prospek jika dilihat dari aspek pembiayaan dan pasar. Komoditi unggulan ini nenas dan jagung. Luas areal tanaman nenas mencapai 212,19 hektar dengan produksi 846,7 ton, atau rata-rata 4 ton/hektar/tahun. Lokasi potensial untuk pengembangan Kecamatan Bengkalis, Bantan, Tebing Tinggi dan Rangsang dengan luas areal pengembangan nenas mencapai 1.300 hektar. Komoditi unggulan berikutnya jagung. Luas areal jagung mencapai 238 hektar, terletak di Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, Mandau dan Tebing Tinggi, dengan produksi total mencapai 2 ton/hektar/tahun. Namun untuk pengembangan potensi tanaman ini lebih diarahkan pada Kecamatan Mandau, Bukit Batu, Tebing Tinggi dan Bengkalis dengan luas areal pengembangan 2.000 hektar.

b. Peternakan

Potensi peternakan yang paling menonjol adalah daging dan telur yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daerah dan sebagian kecil dipasarkan ke luar daerah. Lahan potensial untuk pengembangan ternak mencapai 3.000 hektar, terletak di Kecamatan Bukit Batu (untuk ternak sapi dan kambing), Kecamatan Rangsang (untuk ternak kambing). Kecamatan Merbau (untuk ternak sapi), Kecamatan Bantan (untuk ternak sapi dan ayam) dan pengembangan ternak ayam diarahkan ke Kecamatan Bengkalis.

c. Perkebunan dan Kehutanan

Potensi perkebunan dan kehutanan Kabupaten Bengkalis, antara lain :

1) Kelapa sawit

Luas tanaman ini mencapai 48.368 hektar, dengan tanaman yang menghasilkan seluas 27.382 hektar, terletak di Kecamatan Mandau, Rupat dan Bukit Batu, dengan total produksi (CPO) 59.566 ton/tahun. Lokasi pengembangannya diarahkan pada Desa Sebangka Kecamatan Mandau, Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rupat. Luas areal potensial pengembangan komoditi ini mencapai 26.000 hektar.

2) Karet

Luas areal tanaman karet di Kabupaten Bengkalis adalah 62.3030 hektar, dengan tanaman yang menghasilkan seluas 37.755 hektar. Perkebunan karet tersebar diseluruh kecamatan, terutama Kecamatan Bukit Batu dan Mandau. Sentra pengembangan produksi karet di Kecamatan Bengkalis terletak di Kecamatan Bukit Batu Desa Buruk Bakul, dan Kecamatan Tebing Tinggi Desa Alai. Areal yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai perkebunan adalah Kecamatan Bukit Batu, Rupat, Merbau, Rangsang dan Tebing Tinggi dengan luas areal 29.000 hektar.

3) Kelapa

Luas areal perkebunan kelapa di Bengkalis mencapai 48.198 hektar dengan tanaman yang menghasilkan 36.299 hektar. Areal perkebunan kelapa tersebar diseluruh kecamatan, terutama di Kecamatan Rangsang dan Bantan dengan produksi 263.883.600 butir/tahun. Arah pengembangan lokasi perkebunan kelapa adalah Kecamatan Rangsang dan Bantan.

3) Sagu

Luas areal perkebunan sagu Kabupaten Bengkalis adalah 50.800 hektar, dengan tanaman yang menghasilkan mencapai 25.913 hektar. Penyebaran perkebunan sagu berada di Kecamatan Tebing Tinggi, Merbau, Rangsang, Bengkalis dan Kecamatan Bukit Batu. Penghasil utama komoditas sagu adalah Kecamatan Tebing Tinggi dan Rangsang.

Kawasan hutan berdasarkan RTRW Kabupaten Bengkalis 2002 – 2012 adalah seluas 476.997 hektar, terdiri dari kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan produksi konversi, hutan bakau, dan hutan suaka alam. Untuk hutan mangrove, banyak terdapat di kawasan pesisir Bengkalis antara lain bakau, nipah dan api-api. Ketiga jenis tanaman ini tersebar disetiap gugusan pulau-pulau besar dan kecil, kecuali disekitar kawasan pemukiman, pelabuhan, industri, tanaman pangan basah serta perkebunan. Jika dilihat dari fungsi ekologis, sebagian besar kawasan hutan mangrove masih optimal untuk pengembangbiakan udang, ikan dan biota laut lainnya serta sebagai penghambat terjadinya intrusi dan abrasi pantai. Khusus hutan mangrove yang terdapat di kawasan pesisir perairan Selat Melaka, telah terabrasi dan perlu rehabilitasi dengan menggunakan teknologi (pemecah gelombang).

4. Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Bengkalis adalah perikanan laut dan budidaya. Pengembangan perikanan laut adalah perikanan tangkap dan budidaya laut. Potensi penangkapan ikan laut mencapai 18.895 ton dan baru dimanfaatkan sebesar 15.500 ton/tahun. Untuk pengembangan budidaya laut berupa ikan kakap putih dan udang windu diarahkan pada Kecamatan Bantan, Merbau, Rupal, Rupal Utara, Bengkalis, Tebing Tinggi, Rangsang dan Bukit Batu. Potensi perikanan air tawar di Kabupaten Bengkalis adalah perairan umum (danau, sungai, rawa) dan budidaya kolam. Jenis ikan yang dapat dikembangkan adalah ikan mas, lele, gurame dan patin, serta pengembangan benih ikan air tawar. Lokasi pengembangannya adalah Kecamatan Mandau, Pinggir dan Siak Kecil. Potensi yang dimiliki saat ini berupa tambak, keramba jaring apung dan kolam seluas 170 hektar, dengan perkiraan produksi mencapai 179,68 ton.

e. Kawasan Perindustrian

Dalam pengembangan perindustrian, pemerintah berupaya mengembangkan kawasan industri di Desa Buruk Bakul. Prospek pengembangan kawasan industri cukup cerah karena; berada di kawasan darat dan berhadapan dengan Selat Malaka dan Singapura; berada di pinggiran lautan bebas yang dimungkinkan untuk pengembangan pelabuhan samudera; letak lokasi yang strategis dan berdekatan dengan Dumai, Batam, Bintan dan Karimun; berdekatan dengan wilayah pertumbuhan Sumatera seperti Duri, Dumai dan Pekanbaru; memiliki hinterland yang kaya dengan bahan baku berasal dari komoditi-komoditi utama (kelapa, karet, kelapa sawit).

f. Pariwisata

Potensi pariwisata Kabupaten Bengkalis cukup banyak dan beragam, sehingga prospektif untuk dikembangkan. Potensi pariwisata tersebut adalah; wisata alam terdiri dari Pantai Selat Baru di Kecamatan Bantan dan Pantai Tanjung Medang di Kecamatan Rukat Utara; Tasik Nambus di Pulau Tebing Tinggi, Tasik Puteri Puyu di Pulau Padang, dan Tasik Tiga Puluh Tiga di Siak Kecil; hutan lindung/suaka margasatwa di Bukit Batu; dan pusat pelatihan gajah di Muara Basung Mandau. Sedangkan wisata budaya meliputi; balai adat Sakai di Mandau, pemukiman Suku Akit di Pulau Padang, tarian Zapin Api di Rukat Utara, dan tarian Rakyat Bengkalis. Pengembangan potensi pariwisata diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi dan pengembangan sektor-sektor pendukung pariwisata daerah.

g. Pertambangan

Sektor ini masih merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Kabupaten Bengkalis. Kapasitas produksi potensi pertambangan minyak bumi yang dikelola oleh Caltex di Kecamatan Mandau mencapai 295.747.233 barrel/tahun, dan gas bumi 33.652.231 MSCF/tahun. Sedangkan minyak bumi yang dikelola oleh Kondur Petroleum SA mencapai 21.271.193 barrel/tahun dan gas bumi sebesar 2.250.428 MSCF/tahun di Kecamatan Merbau. Wilayah operasi Kondur Petroleum meliputi Pulau Bengkalis, Padang, Merbau, Rangsang dan Tebing Tinggi. Sedangkan lapangan minyak Caltex yang masih memproduksi adalah

Duri, Melibur, Kurau dan Lapangan Selatan berupa daratan (*onshore*), Lapangan Lalang dan Lapangan Mengkapan di lepas pantai (*offshore*). Selain potensi pertambangan minyak, pertambangan pasir laut juga potensial untuk dikembangkan. Lokasi yang cukup potensial adalah Pulau Rupert, Pulau Merbau, dan Pulau Rangsang. Namun hingga saat ini penambangan pasir laut masih menjadi kontroversi berkaitan dengan kelestarian lingkungan, terutama sebagai objek wisata pantai dan sentra perikanan laut.

2.1.4. Sosial Budaya Daerah

2.1.41. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan telah menggambarkan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tersebut. Pencapaian hasil pembangunan di bidang pendidikan, juga merupakan gambaran komitmen pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis. Adapun hasil yang dicapai atas pelaksanaan program pembangunan dibidang pendidikan pada masa pembangunan tahun 2000-2004 dapat digambarkan, bahwa untuk pendidikan dasar sudah direhabnya sebanyak 812 lokal gedung Sekolah Dasar (SD), penambahan ruang kelas sebanyak 114 lokal, dibangunnya sebanyak 12 unit kelas jauh SD dan tersedianya bangunan baru SD sebanyak 14 unit. Dibangun dan telah tersedianya ruang labor untuk SD sebanyak 5 unit, ruang pustaka 15 unit. Untuk ketenangan guru, kepala sekolah dan penjaga sekolah telah pula dibangun sebanyak 322 unit rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah.

Untuk tingkat SMP, telah pula ditingkatkan sebanyak 79 sarana fisik sekolah, dan telah dibangun sebanyak 20 unit gedung SMP baru, laboratorium sebanyak 19 unit, dan 24 unit ruang pustaka. Sementara itu, upaya meningkatkan kualitas guru dilaksanakan dengan pemberian izin belajar, pelatihan, penataran dan workshop serta studi banding ke sekolah-sekolah yang sudah maju dalam dan luar negeri.

Pada tingkat pendidikan menengah, sudah pula ditingkatkan fasilitas fisik SMA sebanyak 33 sekolah, dan dibangunnya 8 unit gedung SMA baru serta 29

unit labor IPA/IPS/Bahasa yang didukung dengan bangunan ruang pustaka 14 unit, serta telah pula ditingkatkan sarana fisik 7 SMK, termasuk peningkatan kualitas guru dengan berbagai kegiatan dan program, seperti pelatihan bidang studi serta pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa.

Untuk kemajuan sumberdaya manusia, pada jenjang pendidikan tinggi yang komitmen terhadap dunia pendidikan, maka telah tersedia pula ruang rektorat, ruang kuliah, ruang labor, workshop Politeknik Bengkalis, dan telah tersedia pula ruang kuliah untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bengkalis, dan telah tersedia pula ruang kuliah serta kantor pada Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Bengkalis.

Sementara itu, sudah dibangun pula sebanyak 10 unit Taman Kanak-Kanak, serta telah dibangun dan direhabilitasi sebanyak 190 Madrasah yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) serta TPA. Pada bagian lain pula, telah ditingkatkan, direhab dan dibangun fasilitas sarana fisik Maadrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah sebanyak 69 unit Madrasah. Selain itu, telah pula dibangun Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Duri dan selat Panjang.

Hasil pembangunan di bidang pendidikan selama ini telah memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Kabupaten Bengkalis, secara nyata telah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang pendidikan, terwujudnya fasilitas belajar-mengajar yang representatif, meningkatnya daya tampung sekolah dalam melaksanakan wajib belajar 9 tahun, bertambahnya wawasan guru dalam menguasai kurikulum dan materi ajar, terserapnya lulusan sekolah menengah pada jenjang pendidikan tinggi, dan sangat dirasakan terbantunya bagi keluarga yang kurang mampu terhadap pendidikan anaknya dengan adanya pemberian beasiswa.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkalis dalam kurun 2000-2004 telah menunjukkan angka peningkatan yang signifikan. Hampir setiap komponen mengalami peningkatan, karena akses pendidikan kepada masyarakat yang sudah baik. Hasil pembangunan pendidikan tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.6 : Gambaran Keberhasilan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Bengkulu, Tahun 2000-2004

No	URAIAN	Tahun Kegiatan Pembangunan				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	▪ SD	107,43	112,16	114,60	111,90	117,50
	▪ SLTP	73,19	76,46	79,51	80,16	81,07
	▪ SMA	54,62	56,06	57,48	57,99	55,99
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
	▪ SD	92,66	94,24	96,66	97,05	97,77
	▪ SLTP	62,14	65,63	69,37	71,06	76,35
	▪ SMA	48,25	49,61	52,83	53,06	53,44
3	Rata-rata NEM					
	▪ SD	5,62	5,53	5,46	5,91	6,23
	▪ SLTP	4,25	4,72	4,85	4,99	5,28
	▪ SMA	3,90	4,26	4,34	4,83	5,11
4	Rasio Murid dan Guru					
	▪ SD	18,493	18,659	19,219	19,756	20,580
	▪ SLTP	9,744	8,721	9,806	11,050	12,160
	▪ SMA	6,149	6,258	6,383	6,517	6,754
5	Daya Tampung					
	▪ SD	29 : 1	28 : 1	29 : 1	29 : 1	29 : 1
	▪ SLTP	32 : 1	31 : 1	31 : 1	33 : 1	33 : 1
	▪ SMA	33 : 1	36 : 1	33 : 1	34 : 1	34 : 1
6	Persentase Murid DO					
	▪ SD	1,4 %	0,91 %	0,28 %	0,29 %	0,27 %
	▪ SLTP	6,8 %	5,20 %	4,80 %	3,60 %	3,10 %
	▪ SMA	2,1 %	1,40 %	0,65 %	0,35 %	0,27 %

Sumber : LPJ-AMJ Bupati Bengkulu, 2000-2005.

2.1.4.2. Kesehatan

Periode pembangunan di Kabupaten Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir (2000-2004) telah memberikan kontribusi besar pada kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat. Hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan dan sudah pula dinikmati oleh masyarakat tersebut dapat dijelaskan, diantaranya pembangunan Rumah Sakit bertaraf Internasional yang terletak di Bengkulu, Duri dan Selat Panjang. Pembangunan 13 unit Puskesmas, ruang rawat inap di Puskesmas sebanyak 2 unit, serta telah pula dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi terhadap 38 unit Puskesmas Pembantu, dan 24 unit Polindes.

Untuk kelancaran pelayanan kesehatan dan dekatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang baik telah pula dibangun 13 unit rumah dokter, tersedianya 24 unit rumah Paramedis, dengan penyediaan peralatan di rumah sakit maupun Puskesmas yang ada, serta penyediaan obat-obatan. Kesehatan masyarakat yang baik, tidak terlepas dari telah dilaksanakannya kegiatan imunisasi, penyuluhan serta pengamatan terhadap penyakit menular.

Selain itu telah pula dilaksanakan terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil, pembinaan terhadap dukun bayi, supervisi bidan desa serta peningkatan kegiatan Pos Yandu. Pada bagian lain, telah pula dilaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan remaja terhadap anak sekolah. Terhadap 64.773 anak-anak telah pula diberikan Vitamin A, serta terhadap 10.196 ibu hamil telah diberikan Tablet Tambah Darah, telah pula dipulihkan 500 Balita kurang gizi dalam waktu 90 hari, dan pemberian makanan tambahan terhadap 40.000 anak Sekolah Dasar dalam waktu 8 bulan.

Karena itu, telah pula dirasakan meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan baik ditingkat dasar maupun rujukan dan rumah sakit, yang diiringi dengan menurunnya angka kematian ibu dan kematian bayi. Pada sisi lain, telah pula dirasakan oleh masyarakat bahwa menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, karena masyarakat telah melakukan pola kehidupan bersih dan sehat, karena kesadaran dan pengetahuan mereka yang meningkat terhadap upaya upaya pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan. Hal ini tergambar pula dari meningkatnya cakupan penggunaan air bersih serta jamban keluarga, yang diiringi dengan meningkatnya status gizi masyarakat dan terwujudnya kewaspadaan pangan serta gizi.

2.1.4.3. Agama

Dalam pembangunan agama di Kabupaten Bengkalis, sebagaimana Bengkalis Dalam Angka Tahun 2004, terdapat 580 Masjid, 441 buah Langgar dan 96 buah Musholla. Selain itu, terdapat 43 buah Vihara dan 85 buah Gereja. Pada sisi lain, telah terjadi kegiatan pernikahan, talak dan perceraian. Kemudian, Jamaah Haji yang menunaikan Rukun Islam ke lima terus meningkat, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, terdapat warga masyarakat yang melakukan kurban dan orang yang mengeluarkan zakat, infaq, sedekah terus pula mengalami peningkatan.

2.1.4.4. Kebudayaan

Mayoritas masyarakat Kabupaten Bengkalis berkebudayaan Melayu dan beragama Islam. Selain taat menjalankan ajaran ketauhidan agamanya, masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam hidup kesehariannya, luluh dalam

pelukan budaya Melayu dan berpegang teguh pada adat istiadat Melayu. Hal ini disebabkan, sebagian besar Masyarakat Bengkalis berasal dari rumpun Melayu, sehingga dalam kehidupan kesehariannya masyarakat yang berasal dari rumpun etnis lain pun menghormati dan menghargai budaya Melayu dan telah menyebabkan mereka dalam bergaul berpegang pada rajutan adat istiadat Melayu, yang telah pula menjadi Adat dan Budaya Melayu Bengkalis, yaitu Adat bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah.

Suku-suku lain yang bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis selain dari suku Melayu, juga didiami oleh suku-suku lainnya yang telah menyatu pada masyarakat Bengkalis dengan Adat dan Budaya Melayu Bengkalis, seperti Suku Minang, Suku Jawa, Suku Batak, Suku Bugis dan Tionghoa, serta terdapat penganut agama lain selain dari Islam, seperti agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha, serta kepercayaan lainnya. Selain itu, di Kabupaten Bengkalis juga terdapat suku orang asli (suku asli) yang mendiami kawasan pesisir pantai dan kawasan hutan yang kehidupannya masih sederhana, seperti Suku Sakai, Suku laut, Suku Akit, Suku Bonai dan Suku Hutan, dan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan pembinaan setiap tahunnya.

Berkenaan dengan kebudayaan dan kesenian, di Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa macam kesenian, seperti Tari Zapin Belanak dan Zapin Kompang, Joget Anak Laut, Tarian Permainan Anak, Tari Bergendong dan Joget Dangkung. Pada sisi lain, khususnya kebudayaan terdapat pula Budaya Mandi Safar di Rupat Utara, dan beberapa permainan rakyat seperti Main Gasing, Layang-Layang, Jong (perahu kecil) dan lainnya.

Di Kabupaten Bengkalis terdapat pula peninggalan bersejarah yang menggambarkan kebudayaan dan perlawanan masyarakat Bengkalis terhadap penjajahan dan kezaliman lainnya, seperti Makam Datuk Laksamana di Bukit Batu, Makam Datuk Panglima Minal dan Makam Dara Sembilan di Senggoro, Bengkalis.

Kekokohan Adat dan Kebudayaan Melayu tersebut, telah pula diperkuat dengan pembinaan dan pengembangan serta pemeliharaan dan penggalian terhadap nilai-nilai adat dan budaya tersebut. Khusus untuk adat istiadat, telah pula diperkokoh kelembagaan adat tersebut mulai dari tingkat kabupaten sampai

ke kecamatan. Banyaknya kegiatan kebudayaan dan adat istiadat, serta pembangunan Lembaga Adat Melayu sampai ke kecamatan, telah menggambarkan keberhasilan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir, untuk itu pembangunan kebudayaan dengan berdasarkan nilai-nilai luhur masyarakat Melayu Bengkalis, juga mendapat tempat terpenting dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

2.1.4.5. Peningkatan Peran Perempuan

Penduduk Bengkalis berdasarkan data Susenas 2004 terdapat 321.763 perempuan. Pada sisi lain, perkiraan penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah jumlahnya dapat mencapai hampir dua kali lipat penduduk laki-laki. Penduduk perempuan yang buta huruf pun sedikit lebih banyak dari penduduk laki-laki. Masih terdapat angka kematian ibu melahirkan yang relatif tinggi di Kabupaten Bengkalis. Prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil juga masih tinggi, termasuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah bila dibandingkan dengan laki-laki, di mana angkatan kerja perempuan 30,28 persen sedangkan laki-laki 73,49 persen, sementara itu perempuan bukan angkatan kerja 69,71 persen. Di bidang politik, meskipun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan di lembaga legislatif, namun hasil Pemilu 2004 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan tersebut, termasuk peran perempuan di lembaga yudikatif juga masih rendah, walaupun jumlah pegawai perempuan sudah cukup banyak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan sudah menunjukkan peningkatan secara signifikan.

2.1.4.6. Kesejahteraan Sosial

Di Kabupaten Bengkalis masih terdapat keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni, yang diiringi dengan beberapa permasalahan bencana banjir serta kebakaran, yang mengakibatkan terdapat masyarakat yang menderita. Berdasarkan data Dinas Kesejahteraan Sosial terdapat jumlah KK komunitas adat terpencil yang terdiri dari 1.763 KK Suku Sakai, dan 5.492 KK Suku Akit, yang tersebar di 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau, Merbau, Rupa Utara,

Pinggir, Bantan, Bengkalis, Rangsang Barat, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat dan Rangsang. Berkenan dengan itu, adanya penduduk penyandang masalah sosial seperti terlantar, anak nakal, tuna susila, pengemis dan gelandangan, serta narapidana termasuk lanjut usia, merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara terencana.

Kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, banyak kemajuan pembangun dibidang Kesejahteraan Sosial yang tercapai. Keberhasilan selama ini tergambar dengan terwujudnya sarana pemukiman yang layak huni bagi keluarga kurang mampu, warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan telah terwujudnya lingkungan pemukiman kota yang sehat melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh. Pada bagian lain terwujud pula kemandirian lanjut usia, anak terlantar, keluarga mandiri, keluarga miskin, penyandang cacat, karang taruna dan beberapa oragnisasi sosial lainnya melalui kegiatan bimbingan keterampilan dan bantuan paket UEP, dan telah meningkatkan kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran. Keberhasilan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ditandai pula dengan tumbuh dan berkembangnya potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pembinaan dan pemberdayaan karang taruna, Orsos/Ordes, PSM, FK PSM dan pekerja sosial. Pada bagian lain telah pula berhasil melakukan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial terhadap penyandang cacat, Gepeng, WTS, Anak Nakal, melalui bimbingan mental-sosial dengan sistem panti maupun luar panti. Terwujud pula pelayanan dan bantuan sosial terhadap keluarga akibat korban bencana alam, bencana komplik sosial, pekerja migran, orang terlantar serta telah terlaksana bantuan stimulan terhadap masyarakat memerlukan modal usaha kecil untuk mempertahankan kehidupan keluarganya.

2.1.4.7. Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas sumber daya anak dan remaja sangat berpengaruh terhadap upaya pembinaan unsur masyarakat terkecil yaitu keluarga. Berbagai upaya pembangunan untuk meningkatkan harkat dan martabat anak telah dilakukan, namun masih dijumpai berbagai ketimpangan antara anak laki-laki dan anak perempuan, terutama dalam hal peluang dan akses terhadap sumber daya pembangunan, kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat atas hasil-

hasil pembangunan. Ketimpangan ini merupakan masalah struktural yang sudah lama ada dan berkembang dalam masyarakat, dan terutama disebabkan oleh nilai-nilai sosial budaya.

2.1.4.8. Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Di Kabupaten Bengkalis pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan adalah dengan memperhatikan asas kemandirian, yaitu pembangunan kepemudaan dan keolahragaan berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa. Asas manfaat menghendaki bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Pengembangan ini berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pemuda sebagai insan pelopor dan penggerak pembangunan, serta sebagai sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan.

Kegiatan olahraga juga merupakan salah satu bentuk dari kependidikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembinaan pendidikan jasmani, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah, yang harus dilakukan sejak usia muda. Pembangunan olahraga untuk even-even selama ini dicerminkan pula dari pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang mengalami perkembangan yang sangat cepat yang dipusatkan pada kota dan daerah. Dalam rangka pembinaan olahraga telah dibangun dan dikembangkan sejumlah fasilitas olahraga dengan mengacu pada standard internasional.

Periode pembangun Bengkalis sebelum ini (5 tahun belakangan) telah tergambar hasil-hasil pembangunan bidang pemuda dan olahraga, yaitu telah dibangunnya stadion olahraga pada 11 kecamatan, lapangan sepak takraw dan volley ball masing-masing pada 11 lokasi, serta sudah dibangun pula lapangan tenis pada 4 lokasi. Selain itu, tersedianya fasilitas bumi perkemahan pramuka di Bengkalis, Selat Panjang dan Duri. Dengan demikian, telah terlaksana pula pembinaan olahraga prestasi, pembinaan Paskibraka untuk Provinsi dan Kabupaten, pelaksanaan pembinaan kedisiplinan terhadap siswa SMA sederajat, serta terlaksananya pembinaan dan pelatihan kepramukaan di Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga telah pula dirasakan manfaatnya, yaitu dengan meningkatnya prestasi olahraga pada even nasional maupun daerah, motivasi masyarakat dengan kegiatan olahraga semakin bergairah, siswa semakin dirasakan meningkatnya kedisiplinan serta semakin teratur, serta semakin baiknya aktifitas kepramukaan di sekolah-sekolah.

2.1.5. Prasarana dan Sarana Daerah

2.1.5.1. Prasarana Perhubungan Darat

Wilayah Kabupaten Bengkalis secara geografis terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Kondisi geografis yang seperti ini memerlukan kelengkapan prasarana dan sarana perhubungan dengan sistim yang terpadu antar moda transportasi, guna menghubungkan wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Sistem transportasi di Kabupaten Bengkalis terdiri dari sistem transportasi darat dan transportasi laut yang ditunjang oleh transportasi udara. Kondisi prasarana perhubungan darat di Kabupaten Bengkalis didukung oleh panjang jalan meliputi 2.035 km, dengan kondisi 609,34 km dalam kondisi baik, 163,77 km dalam kondisi sedang, 255,19 km dalam kondisi rusak dan sisanya dalam kondisi rusak berat. Dalam mencapai sistim transportasi darat yang terpadu, diperlukan prasarana jembatan dan dermaga penyeberangan yang merupakan keperluan dalam sistem tersebut. Prasarana jembatan utama di Kabupaten Bengkalis meliputi 7 buah jembatan, yang tersebar pada ruas-ruas jalan utama pada tujuh kecamatan, yaitu Siak Kecil, Bukit Batu, Tebing Tinggi Barat, Bantan, Rupert, Merbau serta Rupert Utara. Sedangkan dermaga penyeberangan yang ada di Bengkalis 2 buah yaitu dermaga Ro Ro di Sei. Selari dan Sei. Air Putih.

2.1.5.2. Prasarana Perhubungan Laut

Prasarana perhubungan laut, memiliki peranan sangat penting untuk mendukung transportasi di wilayah kepulauan. Prasarana laut di Kabupaten Bengkalis didukung oleh pelabuhan dan steiger yang relatif banyak, yang merupakan pelabuhan di ibukota kecamatan, pelabuhan di pedesaan, maupun pelabuhan internasional. Pelabuhan yang bertaraf internasional Kabupaten Bengkalis ada di Kota Bengkalis dan Selat Baru.

2.1.5.3. Prasarana Transportasi Udara

Prasarana transportasi udara di Kabupaten Bengkalis didukung oleh bandara di Sei. Selari Kecamatan Bukit Batu. Bandara ini milik Pertamina UP II Dumai – Sei. Pakning, yang merupakan bandara khusus, namun dalam jangka panjang akan dapat melayani kepentingan umum.

2.1.5.4. Prasarana Pos dan Telekomunikasi

Pada saat ini pelayanan jasa pos telah menjangkau seluruh wilayah kabupaten, dengan adanya Kantor Pos pada setiap ibukota kecamatan. Di bidang pelayanan jasa telekomunikasi, pengembangannya dilaksanakan oleh PT. Telkom, Indosat serta Telkomsel, telah mampu menjangkau seluruh wilayah kabupaten, baik dengan pesawat telepon biasa maupun telepon seluler. Kapasitas sentral telepon biasa dan telepon fleksi, yang dikelola oleh PT. Telkom telah mencapai masing-masing 16.690 unit dan 10.955 unit.

2.1.5.5. Prasarana Listrik

Prasarana listrik di Kabupaten Bengkalis dikelola oleh PLN, yang sampai akhir 2004 telah mengoperasikan PLTD yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten. Untuk listrik pedesaan telah terpasang 53 unit PLTD dengan kapasitas perunit adalah 15 KVA, dan tersebar pada 11 kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Jumlah tersebut belum termasuk *captive power* yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis.

2.1.5.6. Prasarana Air Bersih

Prasarana air bersih yang dikelola dengan manajemen PAM, baru tersedia di Ibukota Bengkalis, Duri Kecamatan Mandau, dan Selat Panjang Kecamatan Tebing Tinggi. Sedangkan tempat lain masih mengandalkan kemampuan swadaya dalam bentuk sumur bor maupun sumur gali yang dikelola masing-masing pemiliknya untuk kebutuhan sehari-hari.

2.1.6. Politik dan Pemerintahan

2.1.6.1. Kelembagaan Pemerintahan

Kabupaten Bengkalis sebagai suatu daerah otonom mempunyai seorang kepala daerah yang disebut Bupati dan seorang wakil kepala daerah yang disebut Wakil Bupati. Pengisian kedua jabatan itu dilakukan melalui pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bengkalis dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat pada Tahun 2005. Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan kekuasaan eksekutif, maka sebagai perwujudan kekuasaan legislatif di tingkat daerah, telah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis yang pengisian keanggotaannya melalui Pemilihan Umum pada Tahun 2004. Pemilihan Umum ini diikuti oleh 24 partai politik dan untuk DPRD Kabupaten Bengkalis terdapat hanya 13 partai politik yang berhasil mendudukkan wakil-wakilnya yaitu Golkar 10 kursi, PDI 6 kursi, PPP 5 kursi, PAN 5 kursi, PKS 4 kursi, PBB 3 kursi, PKB 2 kursi, PPKD 2 kursi, Demokrat 1 kursi, PIB dan PDS masing-masing 1 kursi.

Selain lembaga eksekutif dan legislatif daerah sebagai perwujudan dari otonomi daerah, di Kabupaten Bengkalis juga terdapat aparatur pemerintahan pusat yang kewenangannya seperti dinyatakan dalam undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa instansi vertikal itu adalah Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kepolisian Resort Bengkalis, Komando Distrik Militer (Kodim). Kekuasaan yudikatif yang ada adalah Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Agama Bengkalis. Organisasi pemerintahan Kabupaten Bengkalis adalah Sekretariat Daerah dengan 207 PNS, DPRD 25 anggota, Dinas Kimpraswil 119 PNS, Dinas Kesehatan dan KB 72 PNS, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 88 PNS, Dinas Pertanian dan Peternakan 95 PNS, Dinas Perhubungan 72 PNS, Dinas Koperasi dan UKM 31 PNS, Dinas Kehutanan dan Perkebunan 135 PNS, Dinas Perikanan dan Kelautan 55 PNS, Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja 35 PNS, Dinas Kesejahteraan Sosial 32 PNS, Dinas Pemberdayaan 38 PNS, Dinas Pendapatan Daerah 81 PNS, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan 48 PNS, BAPPEDA 48 PNS, Badan Pengawas Daerah 35 PNS, Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi 32 PNS, BALITBANG 18

PNS, Kantor Pertanahan 11 PNS, Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 17 PNS, Kantor Satpol PP 15 PNS, dan Kantor Perpustakaan Daerah 13 PNS. Selain adanya dinas daerah, kantor dan badan daerah, kecamatan dan kelurahan, dalam melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang ada, dibentuk pula cabang-cabang dinas yang ditugaskan pada tingkat kecamatan sesuai dengan keperluan. Adapun keberadaan cabang-cabang dinas yang melaksanakan tugasnya di kecamatan yang diperlukan dapat diberikan contohnya yaitu; Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Bengkalis (18 PNS), Bantan (6 PNS), Bukitbatu (12 PNS), Merbau (12 PNS), Tebing Tinggi (17 PNS), Rangsang (5 PNS), Rangsang Barat (2 PNS), Tebing Tinggi Barat (2 PNS), Rupat Utara (1 PNS), Mandau (22 PNS), Rupat (6 PNS). Di sektor lainnya, seperti kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga mempunyai organisasi pelayanan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (1 Buah), Puskesmas (16 buah), dan Puskesmas Pembantu (74 buah).

2.1.6.2. Aparatur

Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berjumlah 6.730 orang. Apabila dilihat dari jenjang pendidikannya, terdapat lulusan SLTA 2.469 orang, lulusan Sekolah Dasar 199 orang, SMP 171 orang, lulusan Strata 1 dan 2 sebanyak 1.264 orang, dan lulusan D3 (Sarjana Muda atau Ahli Madia) sebanyak 2.627 orang. Dilihat dari jenjang kepangkatan, PNS yang berpangkat golongan III merupakan jumlah yang terbanyak yaitu 4.210 orang diikuti oleh golongan II sebanyak 1.889 orang dan kemudian I sebanyak 131 orang dan golongan IV 500 orang.

Mengenai pengadaan CPNS, sampai dengan tahun 2004 telah diterima penambahan CPNS sebanyak 641 orang yang sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan publik. Penerimaan ini meliputi tenaga kependidikan, tenaga teknis, dan lainnya.

2.1.6.3. Komunikasi, Media Massa dan Telematika

Berdasarkan pertimbangan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia sebagai negara kesatuan dengan otonomi daerah, dimana masing-masing daerah berkesempatan untuk melakukan upaya sendiri dalam mengelola potensinya

dalam meningkatkan pendapatan daerah. Prinsip utama sebagai acuan dalam membangun *e-government* baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diantaranya adalah prinsip koordinasi, keterpaduan dan kesesuaian. Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan *e-government* di Kabupaten Bengkalis harus dapat mengkoordinasikan seluruh informasi yang ada dimasing-masing Dinas/Kecamatan. Implikasinya terhadap pembangunan sistem teknologi informasi diantaranya adalah dibutuhkannya suatu sistem data base, software dan sistem jaringan komunikasi terpadu yang memenuhi standar kompatibilitas dan konektifitas. Untuk itu diperlukan keterpaduan dalam sistem pengumpulan, pengorganisasian, pemasukan/pemutakhiran dan lalulintas data. Data-data penting dari Kecamatan dan Dinas, Instansi, Badan yang meliputi data geografi, data demografi dan administrasi pemerintahan, data moneter dan keuangan, data sumberdaya alam, data politik, data sosial ekonomi, data infrastruktur dan pelayanan umum, data geografi. Semua data ini dapat setiap saat digunakan oleh pihak tertentu untuk mengambil suatu kebijakan seperti kebijakan investasi, pemasaran, pengambilan kebijakan oleh pimpinan dan lain-lain. Perubahan mendasar di bidang informasi, komunikasi dan telematika, disamping memberikan harapan secara faktual juga menimbulkan akses di bidang sosial budaya yang harus diantisipasi dengan kinerja pemerintahan yang mempunyai rencana dan strategi yang terintegrasi dalam suatu manajemen pemerintahan yang mampu mengantisipasi permasalahan aktual bangsa yang tentunya akan menghambat pelaksanaan agenda reformasi. Perkembangan kegiatan dalam rangka penyebaran informasi pembangunan antara lain pembinaan generasi muda terhadap bahaya narkoba untuk siswa/siswi SMU di Kecamatan Tebing Tinggi, Siak Kecil, Bantan dan Bengkalis, kemitraan media massa melalui radio swasta, pemutaran film pada 50 desa dan penyampaian informasi melalui mobil Keliling sebanyak 354 kali.

2.1.6.4. Sosial dan Kamtibmas

Pemerintah Kabupaten Bengkalis di era reformasi, telah mengambil langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk menjaga suasa sosial kemasyarakatan tetap kondusif, antara lain melakukan pendekatan dan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam organisasi paguyuban, pemuka

agama, tokoh adat maupun tokoh-tokoh LSM. Perkembangan LSM terjadi peningkatan dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat yang melibatkan komponen-komponen masyarakat. Perkembangan yang terjadi sampai tahun 2004 terdapat 14 LSM, 2 yayasan dan 4 organisasi yang masih aktif.

Kondisi Kamtibmas dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2005 pada dasarnya berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pesatnya pertumbuhan penduduk dengan komposisi yang heterogen dan meningkatnya angka pengangguran telah menyebabkan peningkatan angka gangguan Kamtibmas di Kabupaten Bengkalis. Kondisi karakteristik wilayah yang terdiri dari pulau-pulau dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, berpotensi menimbulkan kerawanan dan dapat dijadikan sebagai daerah transit bagi pelaku berbagai kejahatan terutama penyelundupan dan terorisme. Masalah krusial lainnya adalah meningkatnya intensitas peredaran narkoba yang masih sulit dideteksi. Disamping itu masih banyak berkembang penyakit masyarakat (PEKAT) lainnya seperti judi, prostitusi, miras, premanisme dan sebagainya. Potensi kejahatan sesuai dengan sumber Polres Bengkalis sampai dengan tahun 2004 menunjukkan adanya gangguan Kamtibmas berupa pembakaran 27 kasus, curas 39 kasus, curanmor 28 kasus, narkoba 16 kasus, perkosaan 11 kasus, penggelapan 30 kasus, curat 263 kasus, senpi 4 kasus, pembunuhan 5 kasus, aniaya berat 20 kasus, pemerasan 31 kasus, pengrusakan 25 kasus, penipuan 48 kasus, curi biasa 60 kasus dan pengancaman 31 kasus.

1.2.7. Kewilayahan

Sesuai dengan letaknya yang strategis sampai saat ini Kabupaten Bengkalis memiliki 13 kecamatan, 136 desa dan 24 kelurahan. Luas masing-masing kecamatan meliputi Mandau 93,747 hektar, Pinggir 250,300 hektar, Bukit Batu 112.800 hektar, Siak Kecil 74.221 hektar, Bantan 42.440 hektar, Bengkalis 51.400 hektar, Merbau 134.891 hektar, Rupal 89.635 hektar, Rupal Utara 62.850 hektar, Rangsang 68.100 hektar, Rangsang Barat 24.160 hektar, Tebing Tinggi 84.959 hektar dan Tebing Tinggi Barat 58.683 hektar.

Dengan jumlah dan luas kecamatan tersebut, hampir seluruhnya merupakan wilayah dataran rendah dengan rata-rata ketinggian antara 2 m - 6,1 m di atas permukaan laut. Beberapa kecamatan merupakan pulau-pulau (lautan/ perairan), meliputi 26 buah pulau besar dan kecil. Adapun pulau-pulau besar adalah Pulau Rupa (1.24,85 Km²), Pulau Tebing Tinggi (1.436,83 Km²), Pulau Bengkalis (938,41 Km²), Pulau Rangsang (922,10 Km²), serta Pulau Padang dan Merbau (1.348,91 Km²), dengan sebagian besar merupakan tanah organosol yang banyak mengandung bahan organik. Lahan-lahan yang ada sangat potensial dikembangkan untuk kawasan budidaya. Apalagi kekuatan kawasan pesisir dan lautan yang cukup luas, menyimpan sejumlah besar potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian wilayah, perikanan laut, budidaya tambak.

Di sisi lain konfigurasi geografis wilayah lautan yang terdiri dari gugus-gugus pulau yang cukup banyak, juga berpengaruh pada mahalnya biaya pengembangan sistem transportasi wilayah. Apalagi diperparah oleh bentukan struktur tanah, sehingga menyulitkan pembangunan infrastruktur. Demikian pula kesulitan tersebut berimplikasi pada kawasan budidaya pertanian. Kesulitan memperoleh sumber air baku dengan kualitas yang baik dan layak untuk penyediaan air bersih.

Dari sisi peluang investasi, investor swasta juga banyak yang berminat untuk berinvestasi, sehingga minat ini harus didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, terutama mengisi kekurangan-kekurangan dalam pelayanan yang perlu dibenahi semaksimal mungkin. Hal yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan adalah perkembangan perekonomian Riau, Batam, IMT-GT untuk memacu pemulihan dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bengkalis.

2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah

2.2.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

1. Lokasi Kabupaten Bengkalis ini cukup strategis berdekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah perairan yang mempunyai akses ke berbagai wilayah, baik dalam maupun luar negeri memiliki potensi untuk pengembangan fisik maupun penataan ruang. Potensi pengembangan itu

memiliki ruang yang cukup untuk mendukung pengembangan sektor dan komoditi unggulan dengan ketersediaan lahan yang cukup luas; memiliki curah hujan yang cukup serta ketersediaan air permukaan yang besar sehingga dapat diarahkan sebagai potensi ketersediaan sumberdaya air guna memasok kebutuhan air domestik, industri dan pertanian, memiliki kedalaman laut yang cukup (20 – 40 m) di perairan Selat Bengkalis sehingga mendukung pelabuhan utama tersier di Desa Buruk Bakul; berada pada jalur lintas timur Sumatera sehingga memiliki akses yang baik ke wilayah Riau daratan lainnya, khususnya Pekanbaru dan Dumai.

2. Dalam rangka pengembangan fisik untuk kegiatan pembangunan perlu dikendalikan derasnya laju *deforestating* untuk mempertahankan proporsi 30 persen luas hutan pada setiap pulau, penanaman kembali dan mengembalikan fungsi lindung bakau, mempertahankan kawasan suakamargasatwa dan kawasan lindung hutan gambut, dan memperhatikan keseimbangan ekosistem wilayah, baik daratan maupun pesisir.
3. Sehubungan dengan banyaknya jumlah sungai besar, maka perlu kerjasama antar wilayah pengembangan, agar kelestarian badan sungai dapat dipertahankan bersama karena sungai ini melalui beberapa kabupaten yang berbeda, sehingga dengan kebersamaan ini dapat dijaga keseimbangan keberadaan sungai dari hulu sampai hilir nantinya.
4. Karena kabupaten ini juga dikategorikan sebagai daerah pantai kondisi ini mempunyai potensi yang luas di bidang perikanan, untuk memberdayakan petani nelayan agar dapat memanfaatkan keberadaan potensi ini dengan maksimal disamping tetap menjaga kelestarian lingkungan pantai agar tetap terjaga. Jika hal tersebut di atas dapat diwujudkan maka Kabupaten Bengkalis dapat menjadi kabupaten penghasil ikan yang cukup diperhitungkan di wilayah Sumatera khususnya.
5. Produktivitas pertanian ternyata tidak terlalu rendah, maka melihat kondisi ini diperlukan investasi yang besar dalam bidang irigasi agar potensi yang besar ini dapat digali seoptimal mungkin, sehingga kontribusi dalam sektor pertanian dapat ditingkatkan bahkan dapat menjadi sektor primadona disamping sektor perkebunan yang telah eksis selama ini.

6. Sangat diperlukan kehati-hatian dalam pengelolaan hutan mangrove karena sifat dari permukaan tanah yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Potensi yang dapat dikembangkan pada masa mendatang adalah kawasan hutan sebagai kawasan lindung untuk menjaga kestabilan permukaan air, perlindungan dan pelestarian terhadap plasma nutfah dan berbagai jenis tanaman yang spesifik terdapat di daerah tropis berlahan gambut, yang berfungsi sebagai penyerap gas karbon.

2.2.2. Demografi

Diproyeksikan pertumbuhan angkatan kerja sampai dengan tahun 2025 rata-rata pertumbuhannya 2,90 persen. Jika pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun 2,90 persen maka pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 3,18 persen. Diperkirakan sampai dengan tahun 2025 sektor yang masih memegang peranan adalah keuangan, dengan pertumbuhan sebesar 4,46 persen.

Tabel 2.7 : Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Orang)

No	Sektor	2005	2010	2015	2020	2025	Pert. (%)
1	Pertanian	131.099	159.503	196.403	223.864	232.807	2,91
2	Pertambangan	24.942	27.762	29.178	27.362	26.131	0,23
3	Industri	17.109	21.577	27.538	32.531	33.593	3,43
4	Listrik	-	-	-	-	-	-
5	Bangunan	34.107	43.530	54.246	61.095	63.536	3,15
6	Perdagangan	34.856	46.096	61.396	75.149	78.151	4,12
7	Pengangkutan	24.764	33.297	44.349	54.283	56.451	4,21
8	Keuangan	4.382	6.003	8.129	10.091	10.494	4,46
9	Jasa	31.456	40.625	51.849	60.383	65.357	3,72
	Kesempatan Kerja	302.715	378.393	473.088	544.758	566.520	3,18
	Angkatan Kerja	324.760	395.686	483.731	555.353	575.576	2,90
	Tenaga Kerja	454.778	522.533	601.361	690.400	709.884	2,25
	Pengangguran	22.045	17.293	10.643	10.595	9.056	- 4,35
	Penduduk (Jiwa)	685.423	810.128	939.160	1.075.595	1.122.485	2,40

Sumber : Data Olahan

Dengan jumlah penduduk yang besar merupakan sumber dari ketersediaan tenaga kerja, namun dengan penyebaran dan kualitas yang rendah tentu menimbulkan permasalahan. Agar permasalahan yang menyangkut penduduk dan ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis dapat terselesaikan dengan baik maka ke depan pembangunan penduduk dan ketenagakerjaan harus memperhatikan :

1. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kemampuan manusia untuk menimbulkan percaya diri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang menyeluruh di semua sektor dan daerah yang ditujukan untuk perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja peningkatan mutu, kemampuan serta perlindungan kesempatan kerja.
2. Pembangunan sektoral dan daerah selalu diusahakan terciptanya perluasan lapangan kerja, pemerataan kesempatan kerja, peningkatan kualitas. Oleh karena itu perlu adanya langkah yang terpadu untuk membina dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu perlu ditingkatkan perencanaan tenaga kerja yang terpadu dan menyeluruh pada skala daerah.
3. Pembinaan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha harus ditingkatkan dan diarahkan pada terciptanya kerjasama yang serasi dan seimbang, dimana masing-masing pihak saling menghormati, saling membutuhkan dan saling mengerti kewajiban dan hak masing-masing dalam seluruh kegiatan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Kebijakan ketenagakerjaan khususnya penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja diusahakan dengan memperhatikan kesinambungan yang lebih mantap antara sektor pertanian dengan sektor lainnya khususnya sektor industri. Untuk itu perlu penyempurnaan sistem informasi tenaga kerja yang mencakup penyediaan dan permintaan tenaga kerja. Sejalan dengan itu akan disempurnakan mekanisme yang tepat bagi penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja di berbagai sektor dan daerah serta pemanfaatan pasar tenaga kerja di luar negeri dengan mempertimbangkan harkat dan martabat serta nama baik bangsa Indonesia dan perlindungan tenaga kerja itu sendiri. Perhatian khusus perlu diberikan kepada angkatan kerja muda usia dan diusahakan sejak dini dari rumah tangga.

5. Kegiatan perusahaan pada hakekatnya merupakan upaya bersama antara pengusaha dan tenaga kerja serta diarahkan untuk pertumbuhan perusahaan maupun untuk kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu perusahaan perlu memberikan imbalan yang layak sesuai dengan sumbangan jasa yang diberikan serta pertimbangan kemanusiaan. Selain itu perusahaan wajib memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja sesuai dengan peningkatan dan kemajuan perusahaan. Sejalan dengan itu akan ditingkatkan peran serikat pekerja. Serikat pekerja yang mewakili tenaga kerja bersama-sama pengusaha memperhatikan nasib dan meningkatkan kualitas tenaga kerja serta mengusahakan agar tenaga kerja memiliki kesadaran dalam turut bertanggungjawab atas kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Pemerintah mengusahakan terciptanya suasana hubungan serasi antara pengusaha dan pekerja, yang lebih mendorong terciptanya kelancaran, efisiensi, produktivitas, atas kelangsungan hidup perusahaan dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan pekerja.
6. Upaya perlindungan tenaga kerja diupayakan melalui perbaikan upah dan gaji serta jaminan sosial lainnya, syarat-syarat kerja lingkungan kerja dan hubungan kerja dalam rangka perbaikan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh bagi tenaga kerja usia muda dan tenaga kerja wanita perlu diberikan perhatian khusus dan perlindungan sesuai dengan sifat dan kodrat serta martabatnya.
7. Kebijakan pengupahan dan pengajian disamping memperhatikan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi, perlu terus diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli golongan penerima upah rendah agar dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum.

2.2.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam

2.2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto

Jumlah Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 sebesar Rp 8.751,36 milyar dan pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp 133.673,74 milyar. Jika dilihat dari peranan sektor, yang paling menonjol adalah masih berada pada sektor pertanian yang mencapai Rp 37.413,95 milyar. Untuk PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2005 sebesar Rp 3.367,59 milyar, meningkat Rp 12.487,60 milyar tahun 2025.

Tabel 2.8 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Bengkalis (Milyar Rupiah)

No	Sektor	2005	2010	2015	2020	2025
1	Pertanian	2.775,04	6.268,86	12.608,92	23.231,12	37.413,95
2	Pertambangan	12,96	35,58	88,53	198,28	398,81
3	Industri	3.174,16	6.509,45	13.969,28	28.097,21	59.013,74
4	Listrik	51,39	113,23	277,75	478,35	1.049,63
5	Bangunan	267,20	506,69	923,26	1.591,10	2.651,04
6	Perdagangan	1.553,67	2.521,79	4.444,26	8.557,04	17.211,26
7	Pengangkutan	197,81	407,01	837,32	1.777,69	3.814,92
8	Keuangan	164,29	296,89	553,08	1.100,40	2.213,30
9	Jasa	554,84	976,75	2.008,12	4.330,48	9.907,09
PDRB		8.751,36	17.636,25	35.660,25	69.361,67	133.673,74

Sumber : Data Olahan

Tabel 2.9 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tanpa Migas Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Bengkalis (Milyar Rupiah)

No	Sektor	2005	2010	2015	2020	2025
1	Pertanian	1.045,16	1.367,59	1.812,94	2.426,12	3.285,16
2	Pertambangan	8,19	11,65	14,87	18,93	23,59
3	Industri	544,10	776,80	1.069,29	1.510,28	2.143,11
4	Listrik	22,71	32,60	44,98	62,79	88,07
5	Bangunan	143,28	200,95	268,92	358,18	473,70
6	Perdagangan	1.006,11	1.411,20	2.002,51	854,86	4.127,19
7	Pengangkutan	123,32	181,19	257,71	369,12	529,92
8	Keuangan	76,27	106,97	149,33	209,44	295,82
9	Jasa	401,45	550,01	767,82	1.076,91	1.521,04
PDRB		3.367,59	4.638,96	6.388,37	8.886,63	12.487,60

Sumber : Data Olahan

Menyangkut peranan masing-masing sektor terhadap PDRB sektor pertanian sampai dengan tahun 2025 diperkirakan menurun 6,25 persen. Sedangkan sektor yang cukup tinggi peranannya adalah transportasi sebesar 7,50 persen, dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2005 sebesar 7,57 persen, dan tahun 2025 hanya sebesar 7,04 persen.

Tabel 2.10 : Distribusi Prosentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tanpa Migas Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Bengkalis (Persen)

No	Sektor	2005	2010	2015	2020	2025
1	Pertanian	31,03	28,47	28,38	27,30	26,31
2	Pertambangan	0,24	0,25	0,23	0,21	0,19
3	Industri	16,07	16,75	16,75	17,00	17,16
4	Listrik	0,67	0,70	0,70	0,71	0,71
5	Bangunan	4,25	4,33	4,21	4,03	3,80
6	Perdagangan	29,88	30,42	31,35	32,12	33,05
7	Pengangkutan	3,66	3,91	4,03	4,15	4,24
8	Keuangan	2,26	2,31	2,34	2,35	2,37
9	Jasa	11,94	12,86	12,01	12,13	12,17
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data Olahan

Tabel 2.11 : Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tanpa Migas Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Bengkalis (Persen)

No	Sektor	2005	2010	2015	2020	2025
1	Pertanian	5,88	5,52	5,80	6,00	6,25
2	Pertambangan	12,18	7,30	5,00	5,00	4,50
3	Industri	8,76	7,50	6,60	7,15	7,25
4	Listrik	5,53	7,50	6,65	6,90	7,00
5	Bangunan	7,47	7,00	6,00	5,90	5,75
6	Perdagangan	7,79	7,00	7,25	7,35	7,65
7	Pengangkutan	9,85	8,00	7,30	7,45	7,50
8	Keuangan	11,98	7,00	6,90	7,00	7,15
9	Jasa	8,81	6,50	6,90	7,00	7,15
PDRB		7,57	6,62	6,61	6,82	7,04

Sumber : Data Olahan

2.2.3.2. Industri dan Perdagangan

1. Pembangunan industri sebagai bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang seimbang dan lebih kokoh, yaitu dengan struktur ekonomi dengan titik berat industri yang maju didukung oleh pertanian yang tangguh. Untuk itu proses industrialisasi

yang berorientasi kepada tersedianya bahan baku di daerah lebih diutamakan dan dimantapkan guna mendukung industri sebagai penggerak utama dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Oleh karena itu pembangunan industri harus membuat industri lebih efisien dan peranannya didalam perekonomian daerah semakin meningkat baik dari segi nilai tambah maupun dari segi kesempatan kerja.

2. Pembangunan industri juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*), menyediakan barang-barang yang bermutu dengan nilai yang terjangkau oleh masyarakat, serta mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan ekspor. Untuk itu perlu mendayagunakan dengan seefisien mungkin sumber daya manusia, sumberdaya energi, devisa dan teknologi tepat guna, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Dalam melaksanakan pembangunan industri agar struktur ekonomi dan struktur industri menjadi lebih kokoh, diusahakan agar terdapat keterkaitan yang erat antara sektor industri dengan sektor-sektor lainnya khususnya sektor industri pertanian. Demikian juga keterkaitan di dalam sektor industri sendiri yaitu keterkaitan antara industri hulu dengan hilir dan antara industri kecil, industri menengah dan industri besar.
4. Pembangunan industri yang menunjang pertanian, seperti industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, baik untuk ekspor maupun untuk pemenuhan konsumsi dalam negeri serta industri yang menghasilkan peralatan dan sarana produksi pertanian, perlu lebih diprioritaskan termasuk industri yang mengelola sumberdaya alam lainnya.
5. Pembangunan industri kecil termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga serta informal dan tradisional diarahkan dan ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan, serta kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, melestarikan dan mengembangkan hasil karya budaya, meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan pengrajin. Untuk itu perlu ditingkatkan bimbingan teknis dan pengusahaan termasuk memasyarakatkan berbagai hasil penelitian. Peningkatan mutu produksi

peningkatan produktivitas dan perluasan pemasaran hasil produksi didalam negeri dan diluar negeri.

6. Pengembangan wilayah pusat-pusat pengembangan industri yang didasarkan kepada potensi yang dimiliki, akan segera dibangun dengan lebih mengutamakan sumber daya manusia, sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelayakan ekonomi dan tata ruang. Dalam hubungan ini perlu ditingkatkan keterkaitan pengembangan industri antar daerah dalam rangka memperkokoh kesatuan ekonomi daerah.
7. Kemampuan peran swasta dan koperasi dalam kegiatan industri terus dikembangkan dengan pembangunan sarana dan prasarana dan penciptaan iklim yang menunjang serta kegiatan usaha pendidikan dan pelatihan termasuk keterampilan dan kemampuan pengelolaan khususnya untuk pengusaha kecil dan koperasi.
8. Dalam pembangunan industri selalu diusahakan untuk memelihara kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran serta pemborosan penggunaan sumberdaya alam. Untuk itu perlu ditingkatkan pemanfaatan limbah serta pengembangan teknologi daur ulang.
9. Dalam rangka meningkatkan daya saing perlu dimantapkan penggunaan Standard Industri Indonesia (SII) untuk produksi dalam negeri. Dengan demikian mutu dan keandalan produksi dalam negeri akan lebih terjamin sehingga daya saingnya akan meningkat pula.
10. Pembangunan perdagangan akan diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi sesuai dengan perkembangan dunia dalam rangka mewujudkan sistem tata niaga dan distribusi nasional di daerah yang efisien dan efektif, melalui kebijakan perdagangan yang terpadu dan saling mendukung dengan kebijakan disektor lainnya.
11. Pembangunan perdagangan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan produsen sekaligus untuk menjamin kepentingan konsumen, meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan pemeratakan kesempatan berusaha. Untuk itu akan dikembangkan penyebaran informasi pasar dan upaya penyederhanaan tata niaga termasuk sistem perizinan serta penyempurnaan lembaga-lembaga pemasaran dan perdagangan, sehingga

lalu lintas perdagangan menjadi lebih lancar serta dapat mendorong persaingan yang sehat.

12. Perdagangan dan penyediaan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya akan diatur distribusinya sehingga lebih menjamin persediaannya secara merata dan dengan tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat. Untuk itu pola pengadaan dan penyaluran bahan-bahan tersebut akan lebih disempurnakan dan terpadu dengan bidang-bidang lainnya seperti bidang produksi, perkreditan, jasa perhubungan sehingga dapat menjangkau ke daerah-daerah terpencil.
13. Guna mendorong ekspor dan produksi untuk ekspor khususnya barang-barang non minyak dan gas bumi, akan ditingkatkan daya saingnya melalui upaya menerobos dan memperluas pasar luar negeri dengan jalan meningkatkan kualitas barang, menjamin kesinambungan produksi dan penyebaran informasi pasar, penyederhanaan prosedur ekspor dan meningkatkan kerjasama internasional.
14. Kebijakan impor lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa khususnya barang modal, bahan baku dan bahan penolong serta teknologi yang diperlukan untuk pembangunan diberbagai sektor. Dalam rangka kebijakan tersebut perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan industri di daerah secara efisien sehingga mampu menghasilkan barang-barang dengan mutu yang relatif baik dan dengan harga yang dapat bersaing di luar negeri.

2.2.3.3. Koperasi

1. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat akan didorong pengembangannya dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. Koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri, dan pertumbuhannya berakar di masyarakat. Untuk itu akan diusahakan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, pendidikan dan pembinaan pengelolaan koperasi.
2. Gerakan memasyarakatkan koperasi ditempuh melalui pendidikan koperasi baik di sekolah maupun di luar sekolah secara profesional. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan usaha kecil dan

menengah dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan koperasi khususnya di daerah pedesaan dan perkotaan. Dalam rangka melaksanakan kebijakan diatas pengembangan koperasi dilakukan dengan mempermudah kesempatan memperoleh kredit dengan syarat lunak, bantuan tenaga manager, latihan keterampilan, pemagangan dan pendidikan keahlian.

3. Kemampuan koperasi untuk berperan lebih besar di berbagai sektor perlu lebih ditingkatkan. Untuk itu akan dibina kerjasama antara koperasi dengan usaha-usaha negara, daerah dan swasta. Selanjutnya dalam menata tatanan kehidupan ekonomi yang lebih adil, koperasi perlu diberi kesempatan yang lebih luas dengan menetapkan lapangan usahanya secara pasti dan menjamin tempat usaha yang permanen, serta dapat turut serta memiliki sebagian usaha-usaha swasta, daerah dan negara.

2.2.3.4. Dunia Usaha Daerah

1. Pengembangan dunia usaha daerah yang terdiri dari badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil menengah akan diusahakan semakin mampu berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan berusaha, dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Untuk itu kemampuan dunia usaha seperti koperasi, usaha kecil menengah, usaha tradisional, sektor informal dan usaha milik daerah, akan terus ditingkatkan agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih tangguh dan mandiri.
2. Kerjasama yang lebih adil antara koperasi, usaha milik daerah, usaha milik negara, usaha kecil menengah, usaha tradisional dan sektor informal, perlu dikembangkan berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang mendorong kerjasama tersebut dalam kerangka itu terus diefektifkan peranan Kadin daerah Dalam pengembangan dunia usaha daerah harus dihindarkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam bentuk monopoli dan monopsoni baik secara langsung ataupun tidak langsung yang nyata-nyata merugikan masyarakat.
3. Upaya penyederhanaan berbagai peraturan daerah yang menyangkut dunia usaha termasuk perizinan serta usaha menjamin kepastian usaha dan

kepastian tempat usaha dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil akan terus disempurnakan.

4. Pengusaha golongan ekonomi lemah dan usaha tradisional akan terus dibina untuk dapat meningkatkan kemampuan usaha dan pemasaran dalam rangka mengembangkan kewiraswastaan, antara lain melalui pendidikan pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis dengan mengikut sertakan usaha besar, usaha milik daerah/nasional. Sejalan dengan itu perlu disediakan berbagai kemudahan dan bantuan seperti kredit permodalan, tempat usaha, bimbingan teknologi tepat guna, informasi pasar dan lain-lain.
5. Langkah-langkah untuk membina dan melindungi usaha tradisional agar dapat meningkatkan kemampuan usaha dan pemasaran, terutama usaha rumah tangga yang berakar pada kebudayaan daerah yang ternyata masih lemah namun mempunyai potensi untuk membuka kesempatan kerja dan menampung tenaga kerja. Dimasa datang perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan efesiensi dan pemasarannya sehingga dapat mengikuti perkembangan pasar tanpa meninggalkan ciri-ciri khas tradisionalnya.
6. Badan usaha milik daerah diusahakan agar lebih efisien dan efektif dengan cara meningkatkan produktifitasnya sehingga peranannya akan menjadi lebih besar dalam pembangunan daerah terutama dalam penyediaan dana yang diperlukan untuk pembangunan daerah.

2.2.3.5. Ketenagakerjaan

1. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kemampuan manusia untuk menimbulkan percaya diri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang menyeluruh disemua sektor dan daerah yang ditujukan untuk perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja, peningkatan mutu, kemampuan serta perlindungan tenaga kerja.
2. Pembangunan sektoral dan daerah selalu diusahakan terciptanya perluasan lapangan kerja, pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas. Oleh karena itu perlu adanya langkah yang terpadu untuk membina dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan tenaga

kerja. Oleh karena itu perlu ditingkatkan perencanaan tenaga kerja yang terpadu dan menyeluruh pada skala daerah.

3. Pembinaan hubungan kerja antar pekerja dan pengusaha harus ditingkatkan dan diarahkan pada terciptanya kerjasama yang serasi dan seimbang, dimana masing-masing pihak saling menghormati, saling membutuhkan dan saling mengerti kewajiban dan hak masing-masing dalam seluruh kegiatan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Kebijakan ketenagakerjaan, khususnya penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja diusahakan dengan memperhatikan keseimbangan yang lebih mantap antara sektor pertanian dengan sektor lainnya khususnya sektor industri. Untuk itu perlu penyempurnaan sistem tenaga kerja. Sejalan dengan itu akan disempurnakan mekanisme yang tepat bagi penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja diberbagai sektor dan daerah serta pemanfaatan pasar tenaga kerja di luar negeri dengan mempertimbangkan harkat dan martabat serta nama baik bangsa indonesia dan perlindungan tenaga kerja itu sendiri. Perhatian khusus perlu diberikan kepada angkatan kerja muda usia dan diusahakan sejak dini dari rumah tangga.
5. Kegiatan perusahaan pada hakekatnya merupakan upaya bersama antara pengusaha dengan tenaga kerja serta diarahkan untuk pertumbuhan perusahaan maupun kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu perusahaan perlu memberikan imbalan yang layak sesuai dengan sumbangan jasa yang diberikan serta pertimbangan kemanusiaan. Selain itu perusahaan wajib memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja sesuai dengan peningkatan dan kemajuan perusahaan. Sejalan dengan itu akan ditingkatkan peranan serikat pekerja. Serikat pekerja yang mewakili tenaga kerja bersama-sama pengusaha memperhatikan nasib dan meningkatkan kualitas tenaga kerja serta mengusahakan agar tenaga kerja memiliki kesadaran dalam turut bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Pemerintah mengusahakan terciptanya suasana hubungan yang serasi antara pengusaha dan pekerja, yang lebih mendorong terciptanya kelancaran, efisiensi, produktivitas, atas kelangsungan hidup perusahaan dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan pekerja.

6. Upaya perlindungan tenaga kerja diusahakan melalui perbaikan upah dan gaji serta jaminan sosial lainnya, syarat-syarat kerja, lingkungan kerja, dan hubungan kerja dalam rangka perbaikan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh. Bagi tenaga kerja usia muda dan tenaga kerja wanita perlu diberikan perhatian khusus dan perlindungan sesuai dengan sifat dan kodrat serta martabatnya.
7. Kebijakan pengupahan dan penggajian disamping memperhatikan arus produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi, juga perlu diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli golongan penerima upah rendah agar dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum.

2.2.3.6. Sumberdaya Alam

1. Kemampuan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya alam akan terus ditingkatkan, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hubungan ini sumberdaya alam harus dimanfaatkan dengan cara yang lebih hemat terutama sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, sedangkan yang tidak dapat diperbaharui perlu terus dikembangkan.
2. Sumber alam yang kita miliki baik di darat, laut dan udara yang berupa tanah, air, mineral, flora dan fauna dan yang lainnya harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan baik untuk masa kini terutama masa yang akan datang.
3. Lingkungan hidup mempunyai fungsi penyanggah peri kehidupan yang amat penting. Oleh karena itu pengelolaanya dan pengembangannya haruslah mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsur secara terus menerus. Dengan demikian mutu dan fungsinya dapat dipelihara dan ditingkatkan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. Sejalan dengan itu pembangunan perlu dilaksanakan

dengan mengindahkan keserasian antara pencapaian sasaran pembangunan sektoral, regional dan lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang. Selanjutnya perlu diusahakan keserasian penduduk dengan lingkungan hidupnya, dikembangkan kesadaran lingkungan serta didorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup.

4. Penelitian, penggalan dan pemanfaatan sumberdaya alam serta pembinaan lingkungan hidup perlu diusahakan dengan menggunakan cara yang tepat sehingga dapat mengurangi dampak yang merusak lingkungan hidup serta mempertahankan mutu dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan demikian pembangunan akan dapat berlangsung secara berkesinambungan.
5. Perubahan mutu dan fungsi lingkungan hidup serta segala unsur-unsurnya harus terus diamati, dikendalikan dan dipertanggung jawabkan secara seksama agar pengamanan dan perlindungannya dapat dilaksanakan setepat mungkin. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan perlu terus diadakan pengamatan dan penelitian tentang pengaruhnya terhadap lingkungan hidup, sehingga pengendalian dan pengamanannya serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.
6. Rehabilitasi sumberdaya alam dilakukan dengan pendekatan terpadu daerah aliran sungai dan wilayah. Oleh karena itu harus ditingkatkan dan disempurnakan upaya rehabilitasi hutan, tanah kritis, konservasi tanah, rehabilitasi sungai, rawa, hutan bakau, karang laut, serta pengembalian fungsi daerah aliran sungai. Sejalan dengan itu untuk mencegah meluasnya kerusakan hutan dan bertambahnya luas lahan kritis, diusahakan agar penyempurnaan peraturan pengelolaan hutan dan pengendalian ladang berpindah-pindah.
7. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut, perairan darat dan kawasan udara, dapat diteruskan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup beserta sumberdayanya.
8. Untuk memenuhi keperluan pembangunan yang beranekaragam segera dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan antara tata guna tanah, tata guna air dan sumberdaya lainnya dalam satu kesatuan lingkungan yang

dinamis. Untuk itu tata ruang berdasarkan suatu pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Sejalan dengan itu kebijakan tata guna tanah perlu disempurnakan dan ditujukan kepada kelestarian produktivitas dan mutu kegunaan tanah serta pencegahan kerusakan dan kemerosotan kesuburan tanah. Selanjutnya kebijakan tata guna air yang cukup, bersih dan berkesinambungan, pencegahan banjir, kekeringan, perlu dikaji ulang dan disempurnakan lagi.

9. Hutan sebagai penentu ekosistem, sekaligus sumber alam yang berguna dan dapat diperbaharui, harus ditingkatkan pengelolaannya serta terpadu untuk menjaga keberadaan dan kelestariannya. Untuk itu inventarisasi dan penatagunaan hutan perlu disempurnakan untuk memantapkan status kawasan hutan dengan berbagai fungsinya. Selanjutnya konservasi hutan termasuk flora dan faunanya perlu dilanjutkan untuk perlindungan ekosistem, pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan serta pendidikan.

10. Pertanian

a. Pembangunan pertanian mencakup pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan yang bertujuan pada perkembangan pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Oleh karena itu pembangunan pertanian harus dapat meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, untuk itu harus ada peningkatan produksi dengan kualitas yang semakin baik dan berkesinambungan, sehingga dapat menunjang pembangunan industri dan meningkatkan ekspor. Untuk itu perlu dilanjutkan usaha-usaha penganeekaragaman diversifikasi, intensifikasi serta rehabilitasi secara terpadu dan merata sesuai dengan kondisi tanah, air, iklim dengan tetap memelihara kelestarian dan lingkungan hidup serta memperhatikan pula kemampuan pengusaha dan pengelolaan serta atas penerapan teknologi yang tepat guna.

b. Peningkatan produksi pangan dan hortikultura, perlu untuk terus ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan penduduk. Disamping itu juga ditujukan untuk memperbaiki gizi antara lain melalui penganeekaragaman jenis

makanan serta peningkatan penyediaan protein nabati dan hewani dengan berpedoman kepada pola konsumsi dan norma kehidupan masyarakat setempat. Upaya peningkatan produksi tersebut melalui peningkatan penanganan pasca panen, kebijaksanaan harga yang layak, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pembinaan peningkatan usaha tani termasuk pemanfaatan lahan kering, pekarangan, daerah rawa dan lahan pasang surut.

- c. Peningkatan produksi perkebunan sebagai bahan baku industri dan ekspor non migas, dilakukan dengan upaya rehabilitasi, peremajaan, penganeekaragaman komoditi serta pemanfaatan daerah gambut dan rawa, penyuluhan, pengembangan informasi pasar serta pemanfaatan teknologi tepat guna.
- d. Peningkatan produksi perikanan, guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan ekspor terus dilanjutkan dan terus ditingkatkan melalui usaha budidaya perairan di daerah pantai, daerah tambak dan air tawar disamping peningkatan usaha penangkapan di daerah pantai dan lepas pantai. Untuk itu perlu diusahakan pengembangan dan penggunaan teknologi tepat guna, penyuluhan dan pembinaan serta penyediaan sarana dan prasarana dan memperbaiki kemampuan tentang informasi pasar. Peranan swasta masih diperlukan sepanjang dapat meningkatkan pemberdayaan nelayan tempatan.
- e. Pembangunan peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta peningkatan ekspor melalui usaha pengembangan daerah-daerah produksi peternakan serta pembinaan daerah-daerah produksi yang sudah ada. Sehubungan dengan itu perlu lebih ditingkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, baik untuk meningkatkan jumlah dan mutu ternak, pemeliharaan kesehatan ternak, penyuluhan pembinaan serta penyediaan sarana dan prasarana. Perhatian perlu lebih ditujukan kepada pengembangan dan perlindungan peternakan rakyat dengan meningkatkan peranan koperasi.
- f. Hutan sebagai sumber kekayaan alam yang penting perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya

bagi kepentingan rakyat dengan tetap menjaga kelangsungan fungsi dan kemampuan dalam melestarikan lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu dalam mengelola hutan sebagai sumber produksi untuk memenuhi bahan baku industri dan bahan baku untuk kepentingan masyarakat, dilakukan berbagai kegiatan melalui peningkatan pengusaha hutan produksi, penyempurnaan tata guna hutan dengan pemantapan tata batas hutan, untuk menghindari kerancuan penggunaan hutan. Dan tetap memperhatikan peranan hutan sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi penduduk disekitarnya.

- g. Pembangunan pertanian dilakukan seiring dengan upaya rehabilitasi lahan kritis untuk memulihkan dan mempertahankan kesuburan tanah, sumber air dan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan pertanian perlu didukung dengan tata guna tanah sehingga penggunaannya, pengusaha, pemilikan dan pengalihan atas hak tanah dapat menjamin kemudahan dan kelancaran usaha-usaha pertanian. Sehubungan dengan itu perlu dicegah pemilikan tanah oleh perseorangan secara berlebihan, serta pembagian tanah menjadi sangat kecil sehingga tidak dapat menjadi sumber penghidupan yang layak. Dalam kaitan ini perlu diusahakan agar pencadangan areal memperhatikan cadangan lahan untuk pengembangan yang akan datang.
- h. Untuk menunjang pembangunan pertanian perlu dilanjutkan usaha penelitian dan pengembangan serta penyuluhan dan pendidikan tenaga-tenaga pertanian dengan mengikutsertakan pihak swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi, sehingga usaha-usaha penyuluhan semakin terarah kepada peningkatan kemampuan masyarakat petani dalam mengelola dan mengembangkan usaha pertaniannya.
- i. Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian keikutsertaan para petani akan ditingkatkan melalui kelompok-kelompok tani yang tergabung di dalam wadah koperasi, sedangkan usaha pertanian yang besar didorong agar dapat lebih memberdayakan dan mengembangkan usaha pertanian rakyat.

11. Pertambangan dan Penggalian

- a. Pembangunan pertambangan dan penggalian ditujukan pada pemanfaatan bagi pembangunan daerah serta ditujukan untuk penyediaan bahan baku bagi industri, meningkatkan ekspor non migas dalam rangka menambah devisa negara, serta memperluas kesempatan kerja. Pembangunan pertambangan dan penggalian terutama dilakukan dengan penganeekaragaman hasil tambang dan penggalian, untuk itu perlu ditingkatkan upaya inventarisasi, pemetaan, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan tambang dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- b. Untuk meningkatkan pemanfaatan hasil tambang dan penggalian, baik untuk ekspor maupun bahan baku industri dalam negeri, perlu ditingkatkan produksi dan usaha pemasarannya terutama di luar negeri, serta usaha pengolahan agar dapat meningkatkan nilai tambah.
- c. Pembangunan pertambangan dan penggalian akan dilakukan secara terpadu dan serasi dengan pembangunan daerah dan sektor-sektor lainnya, dan harus selalu memperhatikan hak rakyat dan kebutuhan masa depan, kelestarian lingkungan hidup serta keselamatan terhadap bencana alam.
- d. Pertambangan rakyat akan diarahkan pada peningkatan pengelolaannya melalui pembinaan usaha, penyuluhan, termasuk pengembangan dan pembinaan koperasi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pertambangan.
- e. Penanaman modal swasta baik modal dalam negeri maupun modal asing perlu terus didorong untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah melalui penciptaan iklim usaha yang sehat dan menarik bagi penanaman modal.

12. Pariwisata

- a. Pembangunan pariwisata dilakukan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan daerah menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta memperkenalkan nilai-nilai budaya daerah. Dalam pembangunan pariwisata tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa di daerah serta kelestarian mutu lingkungan.

- b. Dalam rangka pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan langkah-langkah yang terarah dan terpadu dalam pengembangan objek wisata, kegiatan promosi, pelatihan pramuwisata, penyediaan sarana dan prasarana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pariwisata.
- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata akan ditingkatkan melalui kegiatan pembinaan kelompok-kelompok budaya, industri kerajinan. Oleh karena itu perlu dicegah hal-hal yang dapat merugikan kehidupan masyarakat serta kepentingan pertahanan dan keamanan.
- d. Pertumbuhan dan perkembangan pariwisata dewasa ini mengindikasikan, bahwa pariwisata di Kabupaten Bengkalis belum menjadi sektor ekonomi utama. Sementara itu di dunia, permintaan di sektor pariwisata ini meningkat dan telah menjadi kebutuhan dalam masyarakat modern. Namun kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan sektor ini antara lain terbatasnya infrastruktur, terbatasnya jumlah objek tujuan wisata, jarak antara objek yang relatif jauh, dan terbatasnya sumber daya manusia di bidang pariwisata.
- e. Pengembangan industri pariwisata dengan sasaran wisatawan nusantara maupun mancanegara akan memacu lajunya pertumbuhan ekonomi daerah, karena kegiatan kepariwisataan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan berbagai sektor dan dapat menggiatkan berbagai lapangan kerja, serta mempercepat peredaran uang di suatu wilayah. Tujuan utama pengembangan industri pariwisata adalah untuk meningkatkan penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan yang berkunjung. Agar devisa sektor pariwisata lebih banyak diterima, perlu diusahakan agar wisatawan merasa nyaman dan lebih lama tinggal. Kepariwisataan dapat diharapkan memegang peranan menentukan dalam pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap, dan pada akhirnya menunjang pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, pariwisata merupakan sektor yang kompleks karena bersifat multi aspek. Sehingga dalam pengembangannya menjadi sangat tergantung pada tiga aspek penting, yaitu: (1) *aspek aksesibilitas*, yaitu usaha yang berkaitan dengan kemudahan pencapaian wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata, seperti transportasi dan komunikasi dan informasi; (2) *Daya tarik dan fasilitas wisata*, yaitu obyek wisata alam, budaya, MICE dan

minat khusus. Sedangkan fasilitas wisata adalah usaha perhotelan, jasa boga, perjalanan wisata, penjualan aksesoris/cendramata, penukaran valuta asing dan lainnya; (3) *Sumber Daya Manusia*, yaitu tenaga kerja sebagai pelaku-pelaku yang terlibat dalam pengembangan sektor pariwisata.

- f. Pada masa akan datang, setidaknya ada dua faktor pendorong majunya kepariwisataan, yang ditandai dengan meningkatnya secara drastis kebutuhan akan jasa transportasi, akomodasi, restoran, termasuk usaha yang terkait seperti biro perjalanan, penukaran valuta asing, informasi pariwisata, objek dan daya tarik wisata, dan lainnya, yaitu: **Pertama**, naiknya pendapatan perkapita sebagai akibat langsung berhasilnya pembangunan ekonomi, telah dan akan meningkatkan mobilitas penduduk yang didasarkan oleh berbagai motivasi; **Kedua**, perkembangan politik dunia yang makin mendambakan perdamaian dan mengarah pada kerjasama harmonis internasional. Kondisi ekonomi dunia yang semakin membaik dalam suasana persahabatan yang semakin akrab, sangat memberikan sumbangan besar terhadap kemajuan kepariwisataan secara global. Dalam hal ini, mobilitas wisatawan semakin meluas, diimbangi dengan berkembangnya tuntutan dan permintaan akan jasa kepariwisataan.

2.2.4. Sosial Budaya

1. Perhatian yang menyeluruh terhadap sektor pendidikan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas pada sektor pendidikan formal, akan tetapi juga lembaga pendidikan non formal, sekolah dan luar sekolah harus pula memperoleh pemberdayaan yang maksimal, sehingga potensi dan sarana pendidikan mampu memberikan penyediaan pelayanan pendidikan kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Tanpa kecuali, cakupan pendidikan ini mulai dari pra sekolah, sekolah dasar, SLTP, hingga ke pendidikan tinggi yang ada.
2. Kondisi pendidikan dasar dan menengah di Bengkalis masih dalam kaitan yang sama dengan kondisi pendidikan nasional. Kondisi spesifik yang paling menonjol adalah batasan geografis yang menjadi faktor paling utama, yaitu keterbatasan aksesibilitas transportasi maupun komunikasi. Jumlah peserta

didik dari tahun ke tahun untuk daerah terpencil terus bertambah seiring dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Sementara jumlah sekolah dan guru yang tersedia relatif lebih rendah. Masalah kekurangan guru tidak hanya terjadi di daerah pedesaan, melainkan juga di daerah perkotaan.

3. Secara keseluruhan Bengkalis memiliki sistem sekolah yang cukup memadai, namun sistem tersebut cenderung berkonsentrasi di beberapa tempat, khususnya SMP dan SMU/SMK. Telah cukup terbukti, bahwa pelayanan pendidikan cukup memadai, akan tetapi sarana ini tidak mencapai ke seluruh daerah pedesaan. Menyadari bahwa pendidikan merupakan basis pembangunan sumber daya manusia pada masa datang, maka pemerintah harus melakukan perencanaan pembangunan pendidikan secara mendasar, menyeluruh dan terintegrasi, antara jenis dan jenjang pendidikan maupun dalam kaitannya dengan berbagai kepentingan serta harus dirancang pula secara berkesinambungan.
4. Jumlah siswa yang banyak bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajarnya. Pendidikan akan berhasil dan berdaya guna apabila dikelola dengan sistem manajemen yang baik dan tenaga pengajarnya yang berkualitas. Untuk ke depan diharapkan bagi tenaga pengajar pada pendidikan dasar telah memiliki tingkat pendidikan strata 1 dan seterusnya untuk setiap jenjang pendidikan. Perkembangan jumlah tenaga pengajar baik pada jenjang pra sekolah, pendidikan dasar, menengah dan tinggi belum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat juga kekurangan pada beberapa disiplin ilmu dan penumpukan disiplin ilmu pada satu sekolah.
5. Untuk tetap terus meningkatkan kualitas pendidikan beberapa permasalahan yang tetap harus dijaga antara lain bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar, jumlah guru yang tersebar dan masih banyak lagi yang perlu penanganan lebih serius. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa program wajib belajar 12 tahun harus menunjukkan keberhasilan yang ditandai

dengan menurunnya jumlah angka buta huruf, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

6. Pembangunan pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan dan berkualitas ditujukan pada perbaikan gizi, upaya jangka waktu angka harapan hidup, penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Suatu permasalahan lain yang sangat perlu diperhatikan dan terus dibudayakan adalah kebiasaan masyarakat untuk tetap hidup sehat, bersih serta peduli terhadap lingkungan tempat tinggal, penyediaan air bersih, jamban keluarga pembuangan sampah maupun limbah dan meningkatkan mutu lingkungan hidup masyarakat dalam mencapai kualitas sumber daya manusia yang prima. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai macam program dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.
7. Keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan menciptakan bagian yang harus diprioritaskan khususnya kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi yaitu anak bayi, anak usia balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Kesehatan dan gizi ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari gizi bayi yang akan dilahirkan. Pola pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk balita usia 2 - 4 tahun cukup menggembirakan, dimana persentase yang disusui selama lebih dari 24 bulan meningkat. Disamping pemberian ASI tingkat kelahiran bayi dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dalam rangka meningkatkan upaya pentingnya hidup sehat beberapa program telah diupayakan, salah satunya adalah penggunaan air bersih untuk minum (air kemasan, leding, pompa sumur dalam, sumur terlindungi dan mata air terlindung), dan yang lebih penting adalah perubahan pada tingkat usia harapan hidup yang mencapai 70,46 tahun.
8. Permasalahan umum yang nampaknya tetap menjadi prioritas di bidang kesehatan antara lain adalah rendahnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, kurangnya jumlah dan masih rendahnya mutu lembaga

pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan pelayanan standar medis dengan harga terjangkau, kurangnya ketersediaan sarana air bersih, belum adanya pola sistem sanitasi terpadu yang memenuhi standar kesehatan bagi lingkungan pemukiman, lingkungan industri, dan tempat-tempat umum (*public utilities*), termasuk sistem pengolahan sampah dan limbahnya.

9. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan memperluas pelayanan kesejahteraan sosial terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, terlantar, cacat, tuna sosial serta korban bencana alam maupun bencana sosial dan meningkatkan peran masyarakat dalam menanganinya.
10. Peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan melalui pemberian santunan, rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan sosial termasuk perlindungan anak, pemberian bantuan dan sumbangan sosial masyarakat serta penguatan kelembagaan. Peningkatan ini diharapkan juga mampu mengangkat taraf hidup bagi penduduk miskin, sehingga nantinya memperoleh penghasilan tambahan agar dapat memenuhi standar kebutuhan pokoknya.
11. Penanganan bagi penduduk miskin dilakukan melalui kegiatan keluarga muda mandiri, bantuan kesejahteraan sosial fakir miskin, rehabilitasi sosial daerah kumuh dan bantuan korban bencana. Untuk penanganan kesejahteraan anak dilakukan melalui kegiatan pembinaan anak terlantar, anak putus sekolah, anak nakal dan anak jalanan. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan para penyandang cacat dalam mengurus dirinya dan mengurangi ketergantungan terhadap orang lain/keluarga serta lingkungan, upaya yang dilakukan adalah melalui pelayanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi ekonomi. Dan kelompok masyarakat penyandang masalah tuna sosial yaitu eks narapidana dan wanita tuna sosial, dapat dikembalikan ke masyarakat dan diterima dengan baik.
12. Pembangunan agama saat ini memperoleh tantangan yang sangat serius dari pandangan hidup modern yang memberikan penekanan berlebihan pada aspek materi (*materialisme*), pemujaan yang berlebihan pada kebudayaan barat (*individualisme* dan pemujaan pada kebebasan) serta kecenderungan penyimpangan dari nilai-nilai luhur bangsa sendiri. Pembangunan agama

masih dihadapkan pada beberapa permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang perlu dicarikan solusinya, masih adanya sebagian kecil masyarakat berperilaku asusila, adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan narkoba dan perjudian. Demikian juga masih adanya indikator penurunan nilai-nilai agama, moral dan etika disebagian masyarakat, sehingga terjadinya perceraian, ketidakharmonisan dalam keluarga dan tidak jarang mengakibatkan timbulnya tawuran di tengah-tengah masyarakat. Terjadinya beberapa perilaku yang negatif tersebut, tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama agar setiap individu, keluarga dan masyarakat senantiasa meningkatkan kualitas diri mempelajari dan memahami serta mengamalkan nilai-nilai ajaran agama, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga permasalahan tersebut bisa diatasi sesuai dengan sendi-sendi agama. Peranan agama juga sangat diharapkan sehingga kebudayaan Melayu yang Islami, dapat menjadi tuntunan dan pedoman menuju masyarakat yang madani.

13. Pembinaan terhadap generasi muda dalam meningkatkan semangat dan rasa kebangsaan harus dilakukan. Sisi lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan pendayagunaan potensi, kemampuan dan kompetensi serta sumber-sumber sosial masyarakat seperti; Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), Organisasi Sosial (ORSOS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Karang Taruna, Lembaga Perlindungan Sosial Masyarakat, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta sumbangan sosial masyarakat dan dunia usaha dalam memperbaiki kualitas dan kesejahteraan penyandang masalah sosial.
14. Agar meningkatnya upaya penyebarluasan informasi kesejahteraan sosial bagi masyarakat perlu dibentuk pos-pos pengendalian dan informasi atau klinik informasi kesejahteraan sosial masyarakat pada daerah yang sulit dijangkau.
15. Permasalahan strategis bidang kepemudaan dan olahraga adalah masih perlunya lebih banyak lagi pertanian dan anggaran, sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga, membangkitkan perhatian dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, pemberian penghargaan bagi pemuda dan olahragawan yang mengharumkan nama daerah.

16. Sisi lain adalah belum mantapnya koordinasi serta belum berkembangnya sistim pembinaan keolahragaan yang membatasi berkembangnya prestasi olahraga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selalu itu juga tetap terus memperhatikan permasalahan yang dimiliki oleh atlet olahraga, baik itu sarana dan prasarana serta juga yang tidak kalah pentingnya masalah gizi para atlet sehingga mereka bisa berkompetisi dengan baik. Hal yang paling diharapkan adalah partisipasi pemerintah daerah dalam pemberian kehidupan yang layak bagi para olahragawan yang berprestasi mempertahankan nama baik daerah.

2.2.5. Sarana dan Prasarana

2.2.5.1. Perhubungan

1. Pembangunan perhubungan meliputi perhubungan darat, laut dan udara, telekomunikasi serta pos dan giro untuk memperlancar arus barang, orang dan informasi. Dengan demikian pembangunan perhubungan akan memperlancar roda perekonomian daerah. Untuk itu pembangunan perhubungan perlu dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan sektor-sektor lainnya dengan selalu memperhatikan kelestarian alam serta penghematan energi.
2. Pembangunan perhubungan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perhubungan yang lebih luas, tertib, teratur dan lancar, cepat, efisien dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan keseluruhan daerah. Untuk itu perlu ditingkatkan potensi perhubungan serta peran serta masyarakat.
3. Dalam rangka pemerataan pembangunan perhatian khusus perlu diberikan kepada pembangunan perhubungan untuk daerah-daerah pedesaan, daerah terpencil, daerah perbatasan serta daerah kepulauan.
4. Pembangunan perhubungan darat bertujuan untuk meningkatkan penyediaan kemampuan dan pelayanan angkutan jalan raya serta angkutan sungai, danau, penyeberangan. Pembangunan jalan ditujukan untuk mengutamakan jaringan jalan di pusat-pusat pertumbuhan dan pusat-pusat produksi ke daerah pemasaran, membuka daerah terpencil dan mendukung pengembangan pemukiman.

5. Pembangunan dan pendayagunaan sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan akan ditingkatkan, baik sebagai alat angkutan yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari angkutan jalan raya agar dapat menunjang pembangunan di berbagai sektor dan wilayah, khususnya daerah pemukiman penduduk di pedalaman dan daerah terpencil. Sehubungan dengan itu pembinaan terhadap armada angkutan rakyat perlu ditingkatkan.
6. Pembangunan perhubungan laut bertujuan meningkatkan pelayanan angkutan laut terutama di daerah kepulauan dan daerah pesisir yang relatif terpencil sehingga mampu menghubungkan seluruh wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan perdagangan dan pemasaran hasil produksi. Usaha pelayaran rakyat akan terus dibina dan dikembangkan sehingga angkutan laut makin menjangkau masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan perdagangan.
7. Perhubungan udara akan ditingkatkan kemampuannya dan pengelolaan, terutama melengkapi sarana dan prasarana sehingga mampu melayani penerbangan dalam negeri maupun luar negeri.
8. Peran sektor transportasi dalam pembangunan memiliki arti penting dan strategis yakni untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan pemerataan pembangunan. Selain itu juga peran sektor transportasi dapat memutuskan isolasi dan keterbelakangan daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang perhubungan antara lain adalah: 1) anggaran pembangunan relatif kecil; 2) terdiri dari pulau-pulau; 3) penyebaran penduduk tidak merata; 4) kesenjangan pembangunan antar wilayah, sosial ekonomi; 5) masih ada wilayah terisolir; 7) prasarana dan sarana pendukung pelabuhan masih kurang, sebagai akibat terbatasnya sumber pembiayaan yang tersedia, termasuk pembangunan berbagai dermaga dalam skala besar dan kecil yang belum merata disetiap wilayah.
9. Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari dari pulau-pulau, pesisir pantai, sungai-sungai, menjadikan sektor transportasi sangat dominan terutama untuk menembus isolasi daerah. Oleh karena itu investasi di sektor perhubungan ini sangat terbuka lebar, baik angkutan sungai, fery dan penyeberangan, laut, darat dan udara menjadi sangat strategis. Sedangkan ancaman yang muncul dari sektor ini semakin banyaknya isolasi daerah yang

tidak bisa ditembus karena terbatasnya sumber pembiayaan yang berpengaruh terhadap percepatan pembangunan kawasan pedesaan. Permasalahan tersebut memerlukan perencanaan yang komprehensif dan pembiayaan multi sumber untuk dapat mengatasi permasalahan isolasi daerah.

10. Kondisi di atas perlu diantisipasi melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan pelabuhan, dermaga penumpang dan barang, pelabuhan udara, terminal, jembatan penghubung antar kecamatan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk pengembangan prasarana transportasi, pos dan telekomunikasi guna kepentingan pembangunan dan melayani kebutuhan masyarakat. Demikian pula dengan sumber energi dan pembangkit tenaga listrik yang semakin meningkat baik untuk keperluan industri dan rumah tangga, memerlukan sumber-sumber energi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan. Kebutuhan air bersih yang menjadi persoalan penting di daerah ini karena kebutuhan masyarakat lebih mengandalkan air hujan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
11. Permasalahan dalam pengembangan prasarana dan sarana telekomunikasi adalah; belum meratanya prasarana dan sarana sebagai akibat kondisi geografis yang luas sulit dijangkau; masih terbatasnya mekanisme kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembiayaan pembangunan telekomunikasi dan masih terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia.

2.2.5.2. Energi

1. Pengembangan dan pemanfaatan energi ditujukan kepada pengelolaan energi yang hemat dan efisien dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan masyarakat, industri dan kebutuhan pemerintah untuk jangka panjang. Titik berat pembangunannya adalah upaya penganekaragaman sumber-sumber energi, serta memanfaatkan dan memasyarakatkan sumber-sumber energi alternatif.
2. Pembangunan tenaga listrik direncanakan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan sehubungan dengan itu akan ditingkatkan pembangunan prasarana dan sarana tenaga kelistrikan secara efisien dan terpadu, sehingga

diperoleh tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

3. Usaha kelistrikan masuk desa untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih ditingkatkan. Untuk itu perlu dikembangkan pengadaan listrik dengan menggunakan sumberdaya listrik yang tersedia di daerah setempat seperti tenaga air mikro, tenaga angin, dan lainnya dalam rangka menghemat penggunaan bahan bakar.
4. Beberapa permasalahan pembangunan ketenagalistrikan yang dihadapi untuk keperluan pemukiman masyarakat adalah; biaya yang terlalu tinggi untuk pengembangan listrik pedesaan, karena letak desa yang berjauhan dengan sumber listrik PLTD yang disediakan oleh PLN, sehingga Pemerintah Daerah harus mengadakan unit-unit pembangkit yang kecil di setiap desa yang dikembangkan; keterbatasan dana pada PLN, sehingga lembaga penyedia listrik secara nasional, ini kurang mampu untuk menambah kuantitas tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan.

2.2.5.3. Perumahan dan Pemukiman

1. Pembangunan bidang perumahan dan pemukiman merupakan salah satu usaha yang dapat mendukung berbagai aspek pembangunan seperti sosial politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi pertahanan dan keamanan yang berkaitan antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi. Sejumlah kawasan pemukiman telah berkembang baik secara legal maupun ilegal (ruli), namun melihat dari dinamikanya permintaan terhadap perumahan terutama untuk kelas menengah ke bawah masih memiliki prospek yang baik, oleh karena memang penduduk sebagian besar adalah merupakan pekerja menengah ke bawah sehingganya rumah-rumah type sederhana rating penjualannya cukup tinggi terlebih lagi yang letaknya cukup strategis dalam arti lokasinya dekat dengan kawasan tempat bekerja, ataupun tempat pelayanan umum lainnya.
2. Terkait dengan hal di atas, permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan perumahan dan pemukiman yang terkait dengan penataan ruang Kabupaten Bengkalis adalah:

- a. Pemerintah kewalahan mengikuti tuntutan kebutuhan perumahan dan pemukiman yang cenderung mengikuti pertumbuhan penduduk.
 - b. Belum terpenuhinya kriteria rumah sehat di kawasan permukiman.
 - c. Sulitnya menata kawasan perumahan yang sudah terbentuk sejak lama.
 - d. Topografi wilayah gambut yang sulit untuk dijadikan kawasan perumahan sehingga memerlukan investasi besar dan berdampak pada harga jual rumah.
3. Faktor pendukung dalam pembangunan perumahan diantaranya adalah masih tersedianya lahan yang cukup luas bagi pengembangan kawasan perumahan, disamping tingginya minat masyarakat untuk memiliki perumahan dengan harga yang terjangkau.

2.2.6. Politik dan Pemerintahan

2.2.6.1. Politik dan Demokrasi

1. Mengembangkan konsep kehidupan dan kesadaran berpolitik dan berdemokrasi dalam masyarakat
2. Pengembangan dan penguatan kelembagaan politik dan demokrasi dalam masyarakat.
3. Peningkatan pemberdayaan politik masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tentang pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara jujur dan adil.
5. Penyebarluasan informasi tentang produk hukum bidang politik, baik nasional maupun daerah.
6. Menciptakan stabilitas politik di daerah melalui pendidikan berdemokrasi serta pendidikan etika berpolitik.
7. Mewujudkan hubungan yang baik antar lembaga legislatif dan eksekutif, akan semakin efektif, cepat dan tepat dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat.
8. Perwujudan kemandirian Ormas dan LSM dapat melakukan aktifitas sebagai kontrol sosial yang profesional.

9. Mewujudkan sistem pemantau melalui koordinasi pihak terkait cepat dan tepat serta menangkal isu negatif yang berkembang di masyarakat.
10. Menyediakan sumberdaya manusia yang profesional, dan sarana prasarana penanggulangan bencana sampai pada tingkat kecamatan.
11. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sampai pada tingkat kecamatan dan desa.
12. Peningkatan sarana dan prasarana organisasi BKBPPM.

2.2.6.2. Informasi, Komunikasi dan Media Massa

1. Mengembangkan sistem penerangan dan media massa.
2. Meningkatkan perangkat sistem informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi Online melalui Website.
4. Meningkatkan profesionalisme kewartawanan, yang bebas dan bertanggung jawab.
5. Meningkatkan profesionalisme kehumasan.
6. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan informasi dan komunikasi lembaga pemerintah dan swasta, media cetak dan elektronik (koran, majalah, radio, dan TV)
7. Mendorong, dan mengembangkan pembangunan daerah melalui pengolahan data elektronik yang akurat, aktual dan berkesinambungan.
8. Membangun dan pengembangan sistem informasi agar terwujud interoperabilitas dan interkoneksi elemen-elemen sistem informasi diberbagai sektor dan antar tingkatan pemerintah.
9. Meningkatkan pengetahuan aparatur dan tenaga fungsional
10. Mengembangkan dan peningkatan Pembangunan Daerah melalui Pengolahan data elektronik yang akurat, aktual dan berkesinambungan.
11. Pengembangan sistem informasi agar terwujud interoperabilitas dan interkoneksi elemen-elemen sistem informasi diberbagai sektor dan antar tingkatan pemerintah.
12. Pengembangan dan peningkatan Sumberdaya Manusia yang berwawasan
13. Pelaksanaan Pembangunan Daerah melalui pengolahan data elektronik yang akurat, aktual dan berkesinambungan.

14. Peningkatan penguasaan terhadap sistem informasi agar terwujudnya interoperabilitas dan interkoneksi elemen-elemen sistem informasi diberbagai sektor dan antara tingkatan pemerintah.

2.2.6.3. Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah

1. Merestrukturisasi kelembagaan dan deskripsi jabatan pemerintah daerah melalui SOT dan TUPOKSI.
2. Penataan sistem penyeleksian sesuai prinsip *Good Governance* dan *Clean Governance* serta penempatan aparatur berdasarkan spesifikasi jabatan.
3. Pengembangan aparatur melalui pelaksanaan pendidikan formal, fungsional dan penjenjangan, kursus dan pelatihan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai kebutuhan tugas, fungsi dan peran.
4. Meningkatkan prasarana dan sarana kerja, sistem karier yang jelas, motivasi, harmonisasi hubungan dan suasana kerja, dan kesejahteraan aparatur.
5. Meningkatkan disiplin dan pengawasan terhadap aparatur untuk menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan yang bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (*Clean Governance*).
6. Pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang profesional.
7. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur daerah Kabupaten Bengkalis.
8. Pengembangan dan peningkatan penataan kuantitas sumber daya aparatur daerah di Kabupaten Bengkalis secara efektif dan efisien.

2.2.6.4. Ketertiban, Keamanan dan Supremasi Hukum

1. Terciptanya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal ketahanan negara dan wajib bela negara.
2. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat sehingga perasaan aman dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah ketertiban dan keamanan melalui pengamanan swakarsa dan keamanan lingkungan.

4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam penanganan setiap masalah keamanan.
5. Pengamanan berbagai aset daerah dari ancaman pencurian, penyerobotan, dan pemanfaatan secara semena-mena oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6. Penegakan supremasi hukum yang berkeadilan dalam seluruh aspek yang merupakan salah satu agenda yang fundamental di alam reformasi, sehingga akan tercapai adanya ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakat.
7. Pengembangan budaya hukum bagi masyarakat supaya terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
8. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

2.2.7. Kewilayahan

Bergulirnya isu reformasi di Indonesia, akan berdampak positif pada posisi pengembangan wilayah di Kabupaten Bengkalis yakni dengan dilakukannya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, bersih, dan hukum ditegakkan. Sehingga jika ada penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan tata ruang kabupaten maka pemerintah dapat menegakkan aturan sesuai dengan yang berlaku di Indonesia umumnya dan Provinsi Riau serta Kabupaten Bengkalis khususnya.

Kebijakan nasional untuk mengembangkan sumberdaya alam kelautan, kebijakan ini sangat berdampak positif bagi kondisi wilayah Kabupaten Bengkalis yang memiliki wilayah perairan yang luas. Dalam rangka penegakan hukum yang serius, maka harus diikuti oleh peraturan yang cukup jelas dalam perencanaan tata ruang wilayah, dalam hal ini Kabupaten Bengkalis harus menseriusi pembuatan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata ruang ini, turunan-turunan peraturan tata ruang perlu digesa ke sifat penggunaan yang lebih detail dan implementatif di lapangan sehingga tidak terjadi lagi kesalahan penafsiran makna.

Maka dari itu ke depan untuk menjawab permasalahan di atas dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Bengkalis yang telah ada saat ini, seperti misalnya terjadinya kesenjangan keruangan di Kabupaten Bengkalis maka perlu dilakukan *percepatan pembangunan Kawasan-kawasan tertinggal*. Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah masih menyisakan sejumlah kawasan tertinggal yang terdapat di wilayah daratan maupun kepulauan, terutama di kawasan perdesaan dan kawasan yang terisolir.

Dengan isu pokoknya bagaimana membuka akses darat, laut, dan sungai untuk mempercepat pemerataan dan pembangunan ke kawasan-kawasan yang tertinggal dan terisolir. Meningkatkan keterkaitan ekonomi dan ruang antara kawasan pedesaan/kawasan tertinggal dengan pusat-pusat permukiman di perkotaan. Mengintroduksikan fenomena pasar bebas ke kawasan-kawasan perdesaan dan kawasan tertinggal

Perlu pendayagunaan ruang pesisir dan lautan, sebagian besar dari ruang wilayah Bengkalis merupakan ruang pesisir dan lautan. Potensi sumberdaya alam di wilayah pesisir dan lautan tersebut hingga saat ini belum dimanfaatkan dan dikembalikan secara optimal dalam mengembangkan perekonomian wilayah.

Dengan cara meningkatkan optimalitas pengembangan potensi sumberdaya alam pesisir dan lautan menjadi sektor/subsektor unggulan baru bagi wilayah. Mengembangkan pola pembangunan yang juga berorientasi ke laut, melalui pendekatan pembangunan wilayah maritim (*marine development oriented*).

Kedudukan strategis Kabupaten Bengkalis sebagai kawasan perbatasan, di samping merupakan asset dalam pengembangan wilayah sesungguhnya juga menyimpan kerawanan serta potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan negara jika tidak dikelola dengan serius.

Maka dari itu perlu memperkuat aspek pertahanan dan keamanan sebagai kawasan perbatasan negara tersebut dalam pengembangan wilayah, karena itu perlu diantisipasi bahaya penyalahgunaan pulau-pulau kecil (khususnya yang tak berpenghuni) untuk maksud infiltrasi dan kriminal. Perlu dilakukan sinkronisasi penataan ruang antar wilayah kabupaten sejalan dengan pelaksanaan otonomi

daerah, wilayah kabupaten selain memiliki kapasitas keuangan dan kewenangan yang lebih besar, juga akan memiliki kebebasan yang lebih luas di dalam melaksanakan pembangunan daerahnya. Untuk itu perlu aspek koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah kabupaten dan kota-kota sekitarnya. Fungsi RTRW kabupaten sebagai wahana penjabaran dari RTRW provinsi menjadi sangat penting.

Sejalan dengan spirit peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam penataan ruang, maka keberadaan RTRW Kabupaten Bengkulu harus mampu menjamin adanya demokratisasi ruang bagi segenap lapisan masyarakat, mampu menciptakan peluang dan akses yang sama terhadap setiap pemanfaatan ruang, oleh sebab itu harus bersifat terbuka untuk umum. Penggunaan ruang skala besar oleh satu atau sekelompok orang perlu dihindari agar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ketentuan mengenai luasan atau besaran ruang yang dikuasai dan dikelola oleh investor swasta harus menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Bengkulu.

Bab 3

Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah

3.1. visi

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Bengkalis saat ini, tentang yang di hadapi dalam 20 tahun mendatang serta memperhitungkan modal dasar dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bengkalis, serta amanat pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Bengkalis yang hendak diwujudkan pada tahun 2025 mendatang adalah :

“Menjadi Salah Satu Pusat Perdagangan di Asia Tenggara, Dengan Dukungan Industri Yang Kuat dan sumber Daya Manusia Yang Unggul, Guna Mewujudkan Masyarakat Yang sejahtera dan Makmur”

Keberadaan Kabupaten Bengkalis di Selat Melaka sebagai salah satu selat terpadat di dunia yang bertetangga dengan negara yang tingkat perkembangan dan kemajuan ekonominya sangat pesat dan wilayah kota Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Indonesia bagian barat, memiliki makna yang “sangat strategis” bagi upaya untuk memajukan daerah dan masyarakatnya agar bisa hidup dengan sejajar dengan masyarakat yang berada di negara jiran tersebut.

Sesuai dengan karakteristik perkembangan ekonominya baik yang berada di Singapura dan Malaysia, dimana wilayah tersebut telah menjadi sektor perdagangan dan industri sebagai sektor utama yang mampu mengangkat kebangkitan negaranya hingga menjadi negara yang paling sejahtera dan paling maju sehingga mampu menguasai ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Melihat dari kondisi geoekonomi, geostrategis, dan geopolitik, pada dasarnya Kabupaten Bengkalis memiliki peluang besar untuk dapat menjadikan wilayahnya

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara dengan kontribusi yang diberikan setara dengan negara-negara yang telah lebih dulu maju dan mampu menyesuaikan perekonomian di Asia Tenggara.

Perannya sebagai salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara adalah merupakan bentuk kontribusi yang kongkrit akan diwujudkan pada tahun 2025 mendatang. Hal ini dengan pertimbangan bahwa di bidang ini sangat dimungkinkan sekali, dimana aksesibilitas yang dapat dikembangkan oleh Kabupaten Bengkalis bukan hanya lalu lintas selat melaka saja, tetapi juga pada kawasan timur sumatera sebagai kawasan yang memiliki prospek sangat baik karena tingkat perkembangannya selama dua dasawarsa terakhir ini sangat pesat, bahkan merupakan jalur utama bagi pengembangan kawasan barat Indonesia. Untuk itu Kabupaten Bengkalis harus memainkan perannya bagi *entry* maupun *exit point* aktivitas perekonomian dari wilayah barat Indonesia dari/ke luar negeri.

Dengan wilayah yang luas, cadangan sumber daya alam yang masih tersedia, dan kemudahan aksesibilitas serta infrastruktur yang memadai sangat berpotensi untuk berkembangnya industri dalam skala besar dan teknologi tinggi (*high technology*) yang padat modal, baik untuk industri pengolahan (*processing industry*) maupun industri manufaktur (*manufacturing industry*). Dengan berkembangnya industri-industri tersebut nantinya diharapkan bukan hanya akan memperkuat struktur perekonomian daerah maupun nasional, tetapi juga akan memperkuat perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam kancah perekonomian global, dan semakin mendorong berkembangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul pada akhirnya akan menyejahterakan dan memakmurkan seluruh Kabupaten Bengkalis.

Kesejahteraan dan kemakmuran Kabupaten Bengkalis pada hakekatnya adalah kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat secara merata yang dicapai melalui pengelolaan yang profesional terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang bersinergi, sistematis, dan konseptual antara pemerintah dan seluruh *stakeholders*, yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah,

penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik yang semakin berkualitas, dan berkembangnya tatanan sosial dan budaya masyarakat.

3.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka akan di tempuh melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;** tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas adalah merupakan hal yang utama agar pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat di kelola secara lebih baik lagi. Dengan tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas, maka kemampuan mentransformasikan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat terlaksana untuk memacu pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia yang diharapkan adalah sumber daya manusia disamping memiliki kualitas intelektual dalam bidang penguasaan dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi juga kualitas sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, yakni keimanan dan ketaqwaan yang tinggi serta berjati diri sebagai “Orang Melayu”.
2. **Mewujudkan daya saing daerah;** sebagai Kabupaten yang memiliki kemampuan komperatif dan keunggulan kompetitif dari sisi letak, kekayaan sumber daya alam, kondisi topografi dan geomorfologi daerah, maka perekonomian daerah dikembangkan dan diperkuat dengan berbasis pada potensi dan keunggulan daerah yang ada serta pada kekuatan ekonomi rakyat, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainable*), membangun dan mengembangkan infrastruktur yang maju agar dapat diakses dan mengakses secara merata ke seluruh wilayah.
3. **Mewujudkan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis berlandaskan hukum;** adalah menjadikan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis, responsif,

akuntabel, dan demokratis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, semakin berkembang dan mantapnya eksistensi kelembagaan politik, sosial kemasyarakatan dan kebudayaan sebagai upaya untuk mewujudkan dan mengembangkan “kearifan lokal”, semakin dinamis dan berkembangnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasana kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, serta tanpa diskriminasi.

4. **Mewujudkan peran penting daerah pada tingkat regional, nasional dan internasional;** mengingat letaknya yang sangat strategis di jalur selat melaka, yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan atau sistem politik, sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional, nasional dan internasional, sehingga perlu semakin dimantapkan identitas dan integritas yang dapat menjadikan kebanggaan sendiri sebagai masyarakat Kabupaten Bengkalis, mendorong, meningkatkan dan mengembangkan kemitraan yang sejajar dan saling menguntungkan di berbagai bidang dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.
5. **Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya;** adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang memungkinkan berkembangnya seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintah pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik; sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni melayu, maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang maju, sejahtera dan makmur.

3.3. Arah Pembangunan

Tujuan pembangunan jangka panjang periode 2005-2025 adalah mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang maju, sejahtera dan makmur sebagai landasan bagi tahapan pembangunan berikutnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok dan arah pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas

Meningkatnya mutu sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Index Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran yang digunakan oleh UNDP, dan seimbang laju pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi.

- 1) Pembangunan sumberdaya manusia yang diarahkan pada peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang dicirikan oleh meningkatnya kualitas pendidikan, Pelayanan Kesehatan, dan meningkatnya pendapatan.
- 2) Pembangunan sumberdaya manusia sebagai bentuk investasi (*human investment*) yang manfaatnya akan diperoleh dalam jangka panjang, diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing di era globalisasi.
- 3) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk terutama yang disebabkan karena faktor migrasi, diarahkan pada upaya penertiban administrasi kependudukan dan penataan persebaran agar seimbang sesuai dengan daya dukung lahan, rencana pengembangan wilayah, dan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- 4) Pembangunan pembangunan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, perluasan akses oleh masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu dan murah pada semua jenjang pendidikan, dan mampu melakukan transformasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 5) Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas namun mudah diakses, sistem pembiayaan kesehatan yang fleksibel dan terjangkau, dan sistem pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dibidang kesehatan.
- 6) Pembinaan terhadap pemuda, anak, remaja dan pemberdayaan perempuan, diarahkan pada upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya, melalui upaya penggalian dan pembangunan potensi pemuda, perlindungan terhadap anak, pembinaan remaja, dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.

2. Mewujudkan Daya Saing Daerah

a. Memperkuat Perekonomian Daerah

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mantap sehingga terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh dengan berbasis pada ekonomi rakyat dan potensi sumberdaya alam yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif. Perkembangan dan kemajuan sektor strategis yang berbasis pada potensi daerah, yakni sektor pertanian yang berorientasi agribisnis pada potensi daerah, sektor industry khususnya industry manufaktur (*manufacturing industry*) dan industry pengolahan (*processing industry*), sektor perdagangan lintas negara, antar daerah dan antar pulau, serta dan sektor jasa yang dijadikan sebagai penggerak utama perekonomian daerah yang akan dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan meningkatnya Pendapatan Perkapita pada tahun 2025 menjadi US\$ 6.000,- dan menekan tingkat pengangguran yang lebih rendah serta mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi paling tinggi 2 %.

- 1) Pembangunan perekonomian daerah diarahkan pada upaya memperkuat peran sektor-sektor yang strategis yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif serta memiliki multipler efek yang tinggi terhadap peningkatan pendapatan

masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah, dan mampu menjadikan sebagai salah pusat perekonomian di Asia Tenggara.

- 2) Pembangunan perekonomian daerah juga diarahkan pada terciptanya kemandirian local agar tingkat ketergantungan terhadap eksternalitas dapat dikurangi, terutama terhadap barang kebutuhan pokok, kebutuhan terhadap *input* pertanian dan pengelolaan *output* agar mampu memenuhi kebutuhan lokal.
- 3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk dapat mengeksplorasikan secara optimal potensi yang dimiliki melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan, memberikan peluang usaha yang lebih besar dengan fasilitas yang memadai.
- 4) Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam diarahkan pada upaya pengelolaan dan pemanfaatan yang efisien, efektif berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, menciptakan keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah agar dapat bersinergi dalam suatu “sistem wilayah pengembangan ekonomi” yang terpadu dan terintegrasi sehingga struktur perekonomian yang kuat dan mantap dapat dipertahankan.
- 5) Pembangunan dan pengembangan sektor industry diarahkan agar mampu berperan sebagai pemicu dan pemacu perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya yang potensial, strategis, berbasis kerakyatan dan memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetatif.
- 6) Pembangunan industry diarahkan pada agroindustry yang mendukung kemajuan dan perkembangan sektor pertanian, terutama yang berada pada sektor hulu (*up stream industry*) yang berupa industry penghasil *input* yang diperlukan oleh sektor pertanian dan industry hilir (*down stream industry*) yang mengelola *output* sektor pertanian, serta industri yang berorientasi pada insdustri manufaktur (*manufactur industry*), dan indusri pengolahan (*processing industry*), yang dapat memberikan nilai tambah (*value added*) yang maksimal bagi daerah.

- 7) Pembangunan dan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diarahkan pada sistem pembangunan pertanian yang utuh dan menyeluruh dengan pendekatan sistem agribisnis, dimana bukan hanya memfokuskan pada sistem budidaya pertanian (*on-farm agribusiness*) tetapi juga terkait dengan pengembangan kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi pertanian (*upstream agribusiness*), kegiatan baik sebagai produk antara maupun produk akhir (*downstream agribusiness*), dan mengembangkan kegiatan yang menghasilkan dan menyediakan yang dibutuhkan untuk menunjang berkembangnya sektor pertanian (*supporting institution*). Pembangunan dan pengembangan pertanian juga diorientasikan pada penggunaan *input* luar yang rendah untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan (*low external input sustainable agriculture*).
- 8) Pembangunan perdagangan diarahkan memperluas akses pasar di dalam maupun diluar negeri terhadap berbagai produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor guna mendinamisasi perekonomian daerah dan menambah pemasukan devisa.
- 9) Pengembangan kelembagaan ekonomi diarahkan agar dilakukan secara komprehensif dan dinamis, efisien, efektif dan non diskriminatif mulai dari hulu hingga hilir serta lembaga pendukung lainnya, sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen, berdayanya usaha kecil menengah dan mikro di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Bengkalis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian lokal, regional, nasional dan internasional, yang akan dapat memperkuat struktur perekonomian daerah melalui penguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan tersebut sehingga mampu bersaing.
- 10) Pembangunan sektor jasa diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kebutuhan masyarakat terhadap jasa, sesuai dengan tingkat perkembangan daerahnya dan kondisi serta potensi wilayah. Terutama jasa kepariwisataan yang potensinya sangat besar dan memiliki spesifikasi yang cukup menonjol sebagai daerah maritim.

- 11) Mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang dinamis, responsive dan aspiratif diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas hasil kerja, memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan dan kesejahteraan pekerja, sehingga akan dapat mengatasi pertambahan angkatan kerja, mobilisasi antar sektor dan meningkatkan daya saing pekerja.
- 12) Meningkatkan upaya pemanfaatan kemajuan IPTEK di berbagai aspek diarahkan untuk mempercepat kemajuan di berbagai bidang dan memperkuat daya saing dan kapasitas daerah, melalui penerapan sistem standarisasi yang dapat diakomodir sistem nasional dan internasional.
- 13) Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, terkendali, stabil dan secara berkelanjutan dengan mewujudkan daya tarik yang kuat terutama terhadap sektor-sektor strategis yang dapat memperkuat daya saing dan kapasitas daerah.

b. Membangun Infrastruktur

Tersedianya jaringan infrastruktur yang handal dapat menyatukan seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi suatu kesatuan yang utuh dan terintegrasi, meningkatkan kelancaran mobilitas orang dan barang, juga mampu membuka dan mengembangkan seluruh wilayah serta potensi sumberdaya alam lainnya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Tersedianya pasokan energi listrik dengan jaringan yang dapat diandalkan untuk menjadi penggerak kegiatan ekonomi terutama yang berskala besar, serta terkelolanya sumberdaya air dan lahan secara efisien dan efektif yang berkelanjutan guna menjaga dan meningkatkan produktifitas pertanian.

- 1) Pembangunan transportasi yang diarahkan untuk mengatasi keterisolasian, memperlancar aksesibilitas dan mobilisasi orang serta barang, merangkai pulau dan menyatukan negeri sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan

sumberdaya alam yang akan dapat memberikan keunggulan komperatif bagi daerah.

- 2) Pembangunan kelistrikan yang diarahkan pada kemampuan dalam penyediaan tenaga listrik dengan kapasitas yang memadai untuk industri, perluasan jangkauan pelayanan kepada seluruh masyarakat agar mencapai 95%, dan menciptakan keragaman dalam penyediaan sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik guna mengantisipasi semakin mahalnya biaya *input* bagi pembangkit listrik, dan menyediakan sumber energi yang relatif murah, mudah dan tersedia secara merata keseluruh pelosok wilayah.
- 3) Pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan sistem informasi yang diarahkan untuk perluasan cakupan pelayanan kepada seluruh wilayah baik yang berada di pedalaman, pesisir pantai dan pulau-pulau serta perluasan akses, sehingga seluruh masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan aktifitas sosial, ekonomi, budaya dan politiknya secara lebih dinamis lagi.

c. Membangun dan Mengembangkan Kemampuan Aparatur

- 1) Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tat pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, serta profesional yang mampu melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip *good governace*.
- 2) Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur agar profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai administratur pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara tang tanggap terhadap perkembangan dan kemajuan lingkungan strategis, netral, demokratis, dan bertanggung jawab.
- 3) Pelaksanaan penataan sistem birokrasi diarahkan pada upaya perwujudan sistem yang semakin efesien, efektif, akuntabel, dan transparan, terutama dalam mewujudkan sistem pelayanan prima.

- 4) Mengefektifkan dan mengoptimalkan peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator pembangunan, penyedia pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan minimal, meniptakan lingkungan yang kondusif, stabil dan berdaya saing, serta menjaga kelangsungan mekanisme pasar yang semakin sempurna.

3. Mewujudkan Suasana Kehidupan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Demokratis, yang ditunjukkan oleh:

a. Penegakan Hukum

Terwujudnya upaya penegakan hukum yang dilakukan secara bersungguh-sungguh, konsisten, berkelanjutan dan adil sehingga memberikan jaminan dan kepastian terhadap suasana kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban yang pada akhirnya memberikan daya tarik tersendiri terhadap daerah.

- 1) Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, suasana kehidupan yang semakin kondusif, menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, dan mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN.
- 2) Pembangunan hukum juga diarahkan pada upaya penataan sistem hukum daerah agar sinkron dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan oleh instansi yang lebih tinggi sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan menjadikan Peraturan Daerah merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang berlaku di wilayah Kabupaten Bengkalis.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, netral, demokratis, profesional, taat azas dan taat hukum, yang dapat diukur dari keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan keberhasilan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

- 1) Pembangunan bidang pemerintahan diarahkan untuk dapat terwujudnya pemerintahan yang dinamis, demokratis, netral, transparan, profesional dan bertanggung jawab melalui peningkatan kualitas aparatur, penyempurnaan sistem kelembagaan pemerintahan dan aturan-aturan hukum yang berlaku.
- 2) Menuntaskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan beribawa (*clean government*).

c. Pembangunan Budaya Politik

Terwujudnya suasana kehidupan politik yang semakin demokratis, aspiratif, dan akomodatif dengan tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat.

- 1) Pembangunan politik diarahkan pada upaya peningkatan proses pelembagaan demokrasi yang semakin berkualitas yang dilakukan melalui pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, dan meningkatkan kualitas hubungan dengan antara lembaga eksekutif dengan legislatif, dan antar lembaga legislatif dengan kelembagaan partai yang diwakilinya serta mengembangkan partisipasi politik masyarakat yang didasarkan pada etika dan budaya politik yang sehat dan dinamis.
- 2) Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis melalui penciptaan kesadaran berbudaya, penghormatan terhadap HAM, nilai-nilai persamaan, anti diskriminasi, dan mewujudkan wacana dialogis bagi seluruh komponen agar tidak terjadinya kemacetan informasi dan komunikasi politik dalam masyarakat.

4. Mewujudkan Kabupaten Bengkalis Yang Memiliki Peran Penting Di Lingkungan Regional, Nasional dan Internasional, yang ditunjukkan oleh:

a. Mengembangkan Kerjasama Regional, Nasional dan Internasional

Meningkatnya peran serta dan kontribusi Kabupaten Bengkalis dalam berbagai kerjasama regional, nasional dan internasional guna mewujudkan tatanan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang lebih adil dan damai serta memperkuat kapasitas daerah.

- 1) Penguatan kapasitas dan kredibilitas Pemerintah Daerah dalam rangka ikut serta dalam dinamika pergaulan regional, nasional dan internasional, sehingga mampu menunjukkan eksistensi Kabupaten Bengkalis sebagai bagian dari masyarakat Provinsi Riau, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat internasional karena keberadaannya sangat dengan batas negara tetangga.
- 2) Pengembangan wilayah-wilayah perbatasan diarahkan dan diorientasikan dari *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga kawasan tersebut dapat dijadikan pintu gerbang dan kawasan terdepan bagi aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan Kabupaten dan negara tetangga.
- 3) Peningkatan kualitas pendekatan dengan berbagai pihak yang ada di luar Kabupaten Bengkalis guna memacu pembangunan dan pengembangan wilayah untuk dapat mamaju, mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat dan daerah.
- 4) Penguatan jaringan kerjasama regional dan nasional yang produktif antar pelaku usaha dan pengambil kebijakan untuk dapat meningkatkan arus mobilitas investasi masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan memasarkan berbagai produk yang dihasilkan di dalam daerah.

b. Meningkatkan Investasi Dari Luar Kabupaten Bengkalis

Investasi adalah merupakan sumber utama yang diperlukan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, oleh karena tanpa investasi pertumbuhan ekonomi sulit untuk dicapai. Investasi yang sangat diharapkan adalah yang berasal dari luar Kabupaten Bengkalis.

- 1) Menciptakan suasana yang kondusif agar menjadi daya tarik untuk masuknya investasi ke dalam Kabupaten Bengkalis.
- 2) Membangun dan mengembangkan berbagai fasilitas untuk kemudahan berinvestasi.
- 3) Mengefektifkan pemanfaatan dana-dana yang ada dalam masyarakat untuk usaha-usaha yang produktif dan dapat memberikan multipalier efek yang tinggi bagi peningkatan pendapatan (*income generating*) dan pembukaan kesempatan kerja baru.

5. Mewujudkan Suasana Aman, Damai, dan Harmonis yang Bermoral, Beretika dan Berbudaya, yang ditunjukkan oleh:

a. Pembangunan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Terwujudnya profesionalisme aparat keamanan dan keikutsertaan seluruh masyarakat yang didasari oleh kesadaran yang tumbuh dari dalam dirinya guna mewujudkan suasana aman dan tertib yang beretika, berbudaya dan bermoral.

- 1) Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparat keamanan agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan profesional guna mencegah timbulnya berbagai bentuk gangguan kemanan dan ketertiban.
- 2) Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk meningkatkan dan membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan suasana aman dan tertib secara swakarsa.

b. Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Melayu

Terwujudnya pengapresiasian nilai-nilai budaya Melayu dalam berbagai aktivitas dan suasana kehidupan di pemerintahan dan kemasyarakatan, makin meningkatnya peradaban, harkat, martabat dan memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat Bengkalis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia.

- 1) Pembangunan kebudayaan diarahkan pada penguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan adat melayu, kelembagaan lokal lainnya serta

meningkatkan upaya pengapresasian nilai-nilai budaya Melayu di tengah-tengah kehidupan politik, ekonomi, dan sosial lainnya.

- 2) Pengembangan kearifan lokal yang diarahkan agar adanya keselarasan dan keserasian antara nilai-nilai yang berkembang dalam khasanah masyarakat Melayu dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bab 4

Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan arah sekaligus acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun perencanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun dengan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Seluruh lembaga eksekutif maupun legislatif Kabupaten Bengkalis beserta segenap masyarakat termasuk dunia usaha bersepakat atas visi, misi yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJP Kabupaten Bengkalis Periode 2005 – 2025.
2. Seluruh jajaran lembaga eksekutif maupun legislative Kabupaten Bengkalis beserta segenap masyarakat termasuk dunia usaha wajib mempedomani arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Bengkalis Periode 2005 – 2025 melalui penjabaran program pembangunan jangka menengah lima tahunan untuk mewujudkan visi dan misi daerah.
3. Kepala Daerah/Bupati Bengkalis yang terpilih dalam periode 2005 – 2010 wajib mempedomani visi, misi, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Bengkalis Periode 2005 – 2025.
4. Pemerintahan daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis, mengacu kepada RPJP Nasional dan Provinsi Riau, merumuskan arah kebijakan dan strategi per sektor menjadi dokumen RPJP Kabupaten Bengkalis Periode 2005 – 2025.
5. Masyarakat Kabupaten Bengkalis dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan visi, misi, arah kebijakan dan strategi yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta

masyarakat dalam program yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan, arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam program-program pembangunan.

6. Pada akhirnya periode 2005 - 2025, setiap lembaga eksekutif dan legislative secara bersama-sama wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian - pencapaian yang dihasilkan dalam mewujudkan visi dan misi daerah melalui penerapan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah disepakati bersama.

Bab 5

Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis Periode 2005 - 2025 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan strategi, merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

RPJP Kabupaten Bengkalis yang mengacu kepada RPJP Nasional juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan nasional dan daerah yang kuat dan demokratis.
2. Konsistensi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
3. Keberpihakan kepada rakyat.
4. Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.